

SEJARAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Sebuah Kajian

Oleh:
Sulistyo Basuki

Catatan:
Kajian ini dilaksanakan oleh Sulistyo Basuki pada tahun 2008 untuk dimuat di Situs Web Resmi Perpustakaan Nasional RI (<http://www.pnri.go.id>) sebagai bagian dari kegiatan Pengembangan Situs Web Resmi Perpustakaan Nasional RI tahun 2008.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Pendahuluan
- 1.2. Definisi perpustakaan nasional
- 1.3. Fungsi perpustakaan nasional
- 1.4. Sejarah perpustakaan nasional
- 1.5. Jenis perpustakaan nasional
- 1.6. Asal usul perpustakaan nasional
- 1.7. Fungsi tunggal dan ganda perpustakaan nasional

BAB 2 PERPUSTAKAAN SEBELUM TAHUN 1942

- 2.1. Pendahuluan
- 2.2. Perpustakaan awal abad 17
- 2.3. Perpustakaan pada masa Hindia Belanda
- 2.4. Perpustakaan pada masa Pendudukan Jepang
- 2.5. Tinjauan

BAB 3 PENDEKATAN FUNGSI

- 3.1. Pendahuluan
- 3.2. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
- 3.3. Zaman Permerintahan Hindia Belanda
- 3.4. Zaman Jepang
- 3.5. Zaman Republik Indonesia
- 3.6. Literatur kelabu

BAB 4 PENDEKATAN BERDASARKAN KONSEP

- 4.1. Pendahuluan
- 4.2. Kajian bibliometrika
- 4.3. AGW Dunningham
- 4.4. Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia I
- 4.5. Tim Kerdja Pembentukan Perpustakaan Nasional
- 4.6. Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana (1961-1969)
- 4.7. Biro Perpustakaan
- 4.8. Laporan Selo Soemardjan
- 4.9. Lembaga Perpustakaan
- 4.10. Pusat Pembinaan Perpustakaan
- 4.11. Mastini Hardjo Prakoso
- 4.12. Rachmad Natadjumena
- 4.13. Konsultan asing

BAB 5 PENDEKATAN BERDASARKAN KELEMBAGAAN

- 5.1. Pendahuluan
- 5.2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 5.3. Pusat Pembinaan Perpustakaan
- 5.3. Perpustakaan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

BAB 6 PENDEKATAN BERDASARKAN KOLEKSI

6.1. Pendahuluan

6.2. Perpustakaan Nasional Dep. P & K.

6.3. Pusat Pembinaan Perpustakaan

BAB 7 PENUTUP

BIBLIOGRAFI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Pada hakikatnya setiap perpustakaan memiliki sejarah yang berbeda. Perbedaan sejarah tersebut menyebabkan setiap perpustakaan mempunyai tujuan, anggota, organisasi serta kegiatan yang berbeda-beda juga. Perbedaan tujuan, organisasi induk, anggota dan kegiatan ini mendasari terbentuknya berbagai jenis perpustakaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya berbagai jenis perpustakaan, yaitu:

(1) Tanggapan (respons) sebuah perpustakaan terhadap berbagai jenis bahan perpustakaan.

Respons masing-masing perpustakaan terhadap berbagai jenis bahan perpustakaan, misalnya buku, majalah, film, rekaman suara dan sejenisnya, dapat berbeda-beda. Ada perpustakaan yang mengkhususkan diri pada pengumpulan buku saja, ada yang hanya mengumpulkan rekaman suara saja, ada yang khusus mengumpulkan laporan penelitian, bahkan ada juga yang khusus mengembangkan koleksi peta dan atlas saja. Adanya perbedaan antara bahan perpustakaan (grafis, elektronik) untuk tunanetra dengan yang bukan untuk tunanetra juga dapat menimbulkan perbedaan jenis perpustakaan. Misalnya, perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang mengumpulkan semua jenis bahan perpustakaan tanpa terkecuali, sedangkan perpustakaan khusus untuk tunanetra kemungkinan akan membatasi koleksinya pada buku yang ditulis dalam huruf *Braille*.

(2) Tanggapan terhadap kebutuhan informasi berbagai kelompok pembaca.

Di kalangan masyarakat terdapat berbagai kelompok pembaca, misalnya kelompok anak bawah lima tahun, pelajar, mahasiswa, peneliti, ibu rumah tangga, remaja putus sekolah dan sejenisnya. Masing-masing kelompok pembaca tersebut membutuhkan bahan bacaan yang berbeda tingkat intelektual, penyajian, bentuk fisik dan ukuran hurufnya. Kebutuhan informasi seorang peneliti akan berbeda daripada kebutuhan informasi seorang murid SMU, walaupun keduanya meneliti objek yang sama. Perbedaan tingkat intelektualitas ini menyebabkan perbedaan pada bahan perpustakaan yang dibutuhkan. Misalnya, bila seorang peneliti dan seorang anak SMA sama-sama meneliti gerakan Boedi Oetomo, maka bahan perpustakaan mengenai gerakan Boedi Oetomo yang dibutuhkan peneliti akan berbeda dengan yang dibutuhkan pelajar SMA. Karena adanya perbedaan kebutuhan tersebut, maka tumbuhlah perpustakaan yang mengkhususkan diri melayani kelompok pembaca tertentu, misalnya perpustakaan yang khusus melayani ibu rumah tangga atau anak-anak saja. Masyarakat umum dilayani oleh perpustakaan umum, sedangkan peneliti dilayani oleh perpustakaan khusus. Perpustakaan perguruan tinggi melayani dosen dan mahasiswa, sedangkan perpustakaan sekolah melayani anak sekolah.

(3) Tanggapan terhadap spesialisasi subjek.

Tanggapan terhadap spesialisasi subjek mencakup tanggapan terhadap ruang lingkup subjek serta rincian subjek yang bersangkutan. Perkembangan ilmu mempunyai imbas yang kuat terhadap perpustakaan. Suatu ilmu dapat berkembang dan terpecah menjadi lebih dari satu ilmu baru. Sebaliknya, dua ilmu atau lebih dapat juga lebur menjadi ilmu baru. Pada masa yang lalu hanya ada satu ilmu, yaitu filsafat, yang kemudian pecah menjadi ilmu baru seperti Sains serta Ilmu-Ilmu Sosial

dan Humaniora. Selanjutnya Ilmu-Ilmu Sosial berkembang lagi sehingga tumbuh ilmu-ilmu baru seperti Sosiologi, Hukum, Ilmu Politik dan lain-lainnya. Pemecahan sebuah ilmu menjadi ilmu baru dikenal dengan istilah fisi, sedangkan penggabungan dua ilmu atau lebih menjadi ilmu baru dikenal sebagai fusi. Contoh fusi adalah penggabungan Biologi dan Kimia menjadi Biokimia (*Biochemistry*). Biokimia pecah lagi menjadi Biokimia Biologi (*Biological Biochemistry*) dan Biokimia Fisik (*Physical Biochemistry*). Terjadinya fisi dan fusi ilmu dengan sendirinya mendorong pertumbuhan bahan perpustakaan dengan subjek-subjek baru. Pertumbuhan subjek-subjek baru pada gilirannya mempengaruhi tumbuhnya berbagai jenis perpustakaan, sehubungan dengan adanya perpustakaan yang mengkhususkan koleksinya pada subjek tertentu.

Dalam kenyataan sehari-hari, pembaca mempunyai minat serta kebutuhan informasi yang berbeda derajat kedalaman walaupun subjeknya sama. Misalnya seorang mahasiswa dan murid SD berminat terhadap geografi pulau Sumbawa. Walaupun terdapat kesamaan minat di antara keduanya, ada perbedaan kedalaman subjek yang mereka perlukan. Misalnya, si mahasiswa lebih mendalami asal usul kesultanan Sumbawa sementara si murid SD terbatas pada sejarah singkat kerajaan Sumbawa. Karena kebutuhan kedalaman subjek bahan perpustakaan yang dibutuhkan berbeda, maka buku yang disediakan perpustakaan pun akan berbeda. Ditinjau dari segi cakupannya, maka ada pembaca yang menginginkan cakupan subjek yang luas dan tidak terlalu terinci, ada yang memerlukan cakupan singkat saja, namun ada juga yang memerlukan cakupan subjek yang sempit namun mendalam. Adanya kebutuhan informasi mengenai suatu subjek dengan intensitas intelektual yang berbeda-beda menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis perpustakaan yang koleksinya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat intelektualitas pembacanya. Sebagai contoh, perpustakaan umum menyediakan koleksi yang bersifat umum dengan tingkat intelektual yang sesuai dengan masyarakat setempat, perpustakaan khusus menyediakan koleksi yang khusus, spesifik (khas), dengan tingkat intelektualitas sangat tinggi, perpustakaan nasional menyediakan koleksi untuk tingkat universitas ke atas, sedangkan kebutuhan murid SD sampai SMA dilayani oleh perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum. Bila pembaca memerlukan bahan perpustakaan yang tidak tersedia di perpustakaan tertentu, ia dapat memperoleh bahan perpustakaan yang diperlukan tersebut melalui kerja sama perpustakaan.

Dalam berbagai literatur terdapat berbagai jenis perpustakaan. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa terdapat lima jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Karena fokus tulisan ini adalah perpustakaan nasional, maka hanya perpustakaan nasional saja yang akan dibahas lebih lanjut.

1.2. Definisi perpustakaan nasional

Pada tahun 1970, dalam konferensi umumnya yang ke 16, UNESCO mengeluarkan *Recommendations Concerning the International Standardization of Library Statistics* yang memuat definisi perpustakaan nasional sebagai berikut:

Perpustakaan nasional: perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan, yang diterbitkan di sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan "deposit", baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan. Perpustakaan nasional juga umumnya menjalankan fungsi sebagai berikut: menyusun

bibliografi nasional; menyimpan dan memutakhirkan koleksi asing yang bernilai tinggi dan representatif termasuk buku mengenai negara yang bersangkutan; bertindak sebagai pusat bibliografi nasional; menyusun katalog induk; menerbitkan bibliografi nasional retrospektif. Perpustakaan yang menyebut dirinya sebagai perpustakaan "nasional" namun fungsinya tidak sesuai dengan definisi di atas tidak dapat dimasukkan ke kategori "perpustakaan nasional."

Definisi tersebut sedikit berubah dalam hasil pertemuan Conference of Directors of National Libraries(CDNL) di Bangkok tahun 1999. Konferensi tersebut memberikan definisi sebuah perpustakaan nasional sebagai berikut.

Sebuah institusi, terutama didanai (langsung atau tidak langsung) oleh negara, yang bertanggung jawab atas pengumpulan secara komprehensif, pencatatan bibliografis, pelestarian dan menyediakan warisan dokumenter (terutama materi yang diterbitkan dalam semua jenis) yang berasal atau berkaitan dengan negara tersebut; dan dapat juga bertanggung jawab atas pelaksanaan lebih lanjut fungsi perpustakaan di negara tersebut secara efisien dan efektif melalui tugas seperti manajemen koleksi yang maknawi secara nasional, penyediaan infrastruktur, koordinasi aktivitas perpustakaan dan sistem informasi di negara bersangkutan, hubungan internasional, dan melaksanakan kepemimpinan. Biasanya tanggung jawab ini secara formal diakui lazimnya berdasarkan perundang-undangan. Untuk keperluan definisi ini maka sebuah negara didefinisikan sebagai negara independen berdaulat. Institusi yang disetarakan dengan perpustakaan nasional terdapat juga di entitas nasional non-berdaulat seperti di Catalonia, Quebec dan Wales^{1[1]}.

Definisi di atas akan digunakan selanjutnya dalam makalah ini.

1.3. Fungsi perpustakaan nasional

UNESCO membakukan fungsi perpustakaan nasional dalam tiga kategori, yaitu fungsi utama (*main function*), fungsi yang diinginkan (*desirable function*) dan fungsi yang mungkin dilaksanakan (*possible function*).

1.3.1. Fungsi utama atau fungsi pokok perpustakaan nasional ialah:

- (a) Mengumpulkan dan melestarikan literatur nasional dengan sasaran selengkap mungkin. Dengan kata lain fungsi pertama perpustakaan nasional ialah menyimpan semua bahan perpustakaan tercetak dan terekam yang diterbitkan di suatu negara. Dengan demikian ada perpustakaan nasional yang mengumpulkan semua terbitan dari suatu negara, namun ada pula perpustakaan nasional yang hanya mengumpulkan terbitan dengan subjek tertentu dari suatu negara serta juga terbitan asing dalam subjek yang diminati. Dalam hal ini National Library of Medicine di Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai perpustakaan nasional bidang khusus. Perpustakaan nasional bidang umum dapat ditemukan di setiap negara yang memiliki perpustakaan nasional, karena jenis inilah yang banyak ditemukan di dunia.
- (b) Menerbitkan bibliografi nasional. Bibliografi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi pertama, yaitu mengumpulkan dan melestarikan terbitan sebuah negara.
- (c) Melaksanakan jasa pinjam antarperpustakaan.
- (d) Bertindak sebagai penyelenggara jasa informasi bibliografis nasional.
- (e) Menerbitkan atau menunjang penerbitan bibliografi khusus.

1.3.2. Fungsi yang diinginkan (*desirable function*) dari perpustakaan nasional ialah:

^{1[1]} "National libraries" *International Encyclopedia of Information and Library Science*. Edited by John Feather and Paul Sturges. 2nd ed. (London: Routledge, 2003), p. 445

- (a) bertindak sebagai pusat penelitian dan pengembangan dalam pekerjaan perpustakaan dan informasi;
- (b) menyediakan pendidikan dan pelatihan dalam pekerjaan perpustakaan dan informasi;
- (c) bertindak sebagai pusat perencanaan bagi perpustakaan sebuah negara.

1.3.3. Fungsi yang dimungkinkan ialah:

- (a) bertindak sebagai pusat pertukaran bahan perpustakaan antarperpustakaan;
- (b) menyediakan jasa perpustakaan khusus untuk lembaga pemerintahan; bertindak sebagai museum buku.

1.4. Sejarah perpustakaan nasional

Perpustakaan nasional dalam kepastakawanan modern mencakup sejumlah perpustakaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain menyangkut masalah dan sifat aktivitasnya. Di antara para ahli belum ada kesepakatan mengenai definisi perpustakaan nasional. Karena itu mereka menekankan pada cirinya dan mereka sepakat bahwa perpustakaan nasional lebih baik dilihat dari definisinya. Maka disepakati cirinya sebagai penyimpanan publikasi nasional. Fungsi ini disepakati karena berkat fungsi ini muncul perpustakaan yang menjadi perpustakaan nasional.

Perkembangan perpustakaan nasional sangat erat kaitannya dengan perkembangan perpustakaan di negara berdaulat yang bersifat borjuis. Pengembangan perpustakaan nasional merupakan upaya konsolidasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional di negara tersebut. Perpustakaan nasional didirikan untuk mengumpulkan dan melestarikan publikasi sebagai pengejawantahan keberhasilan intelektual di negara yang bersangkutan.

Proses berdirinya perpustakaan nasional dimulai tahun 1795, ketika Konvensi Nasional Prancis mengumumkan bahwa perpustakaan, yang sebelumnya merupakan milik raja, menjadi milik nasional serta memberikan hak kepada Konvensi Nasional untuk memperoleh kopi deposit semua publikasi tercetak yang diterbitkan di Prancis. Menyusul terbentuknya perpustakaan nasional di Prancis tersebut terdapat 20 perpustakaan nasional yang terbentuk pada abad 19. Pada abad 20 lebih dari 30 perpustakaan nasional terbentuk dan lebih banyak lagi setelah Perang Dunia II usai dengan lahirnya berbagai negara baru yang lahir berkat berlangsungnya dekolonisasi dan proses demokrasi.

Tidak semua perpustakaan nasional memiliki status resmi sebagai perpustakaan nasional. Banyak juga yang statusnya tidak resmi. Sepanjang sejarah eksistensinya, perpustakaan nasional sebagai sebuah konsep tipologis mengalami evolusi yang signifikan. Perkembangan perpustakaan nasional hingga menjadi bentuk seperti yang ada sekarang memerlukan proses yang memakan waktu sekitar satu setengah abad, berlangsung diam-diam dan harmonis.

Prinsip akuisisi koleksi sebagian besar perpustakaan nasional ialah keluasannya (*exhaustiveness*). Prinsip ini dirumuskan oleh Antonio Panizzi, yang berkarya di British Museum Library. Panizzi berpendapat bahwa British Museum Library harus memiliki "koleksi terbaik literatur berbahasa Inggris dan koleksi terbaik literatur dari semua negara di luar negara-negara berbahasa Inggris tersebut." Dalam bahasa aslinya "*the best collection of English literature and the best collection of literature of all other countries outside of each of these countries.*" Akuisisi selengkap mungkin karya tercetak tentang semua cabang ilmu pengetahuan dari semua negara dalam semua bahasa merupakan tujuan perpustakaan nasional.

Aspirasi ini sampai pada tahap tertentu akan sulit diwujudkan. Misalnya Library of Congress, Perpustakaan Negara Lenin, British Museum Library, Bibliotheque National di Paris memang memiliki sifat unik berkaitan dengan isi dan besaran koleksinya yang mencakup terbitan luar dan dalam negeri. Namun, bila setiap perpustakaan nasional memiliki koleksi dengan signifikansi internasional, maka di setiap negara hanya perpustakaan nasional yang terkaya dan terbesar jumlah koleksinya. Pada kenyataannya, bila dilihat dari segi koleksi, maka mungkin hanya ada 10 perpustakaan nasional yang memiliki koleksi lebih dari 10 juta, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jerman, Inggris, Rumania, Hongaria dan tiga lainnya. Bila standar jumlah koleksi perpustakaan nasional diturunkan menjadi 5 juta, maka negara yang memilikinya bertambah akan menjadi lebih banyak.

Selama periode seratus lima puluh tahun pertama, sebagian besar perpustakaan nasional memiliki garis haluan konservatif dalam kaitannya dengan jasa bagi publik. Semuanya perpustakaan nasional memiliki akses yang relatif terbatas bagi publik. Hal ini dapat dijelaskan atas alasan sosiopolitik dan tradisi historis. Banyak perpustakaan nasional yang berasal dari universitas tetap mempertahankan fungsi dan penggunaannya, yaitu pengajar dan mahasiswa.

Dalam kaitannya dengan perpustakaan lain di sebuah negara, perpustakaan nasional menempati kedudukan yang independen dengan berbagai pengecualian atau pengkhususan. Perpustakaan nasional tidak ikut serta dalam layanan pinjam antarperpustakaan atau bentuk kerja sama perpustakaan lainnya.

Selama lima puluh tahun terakhir ini situasi berubah sangat cepat. Pada paruh pertama abad 20 muncul krisis yang menimpa perpustakaan nasional, yaitu:

- (1) Perpustakaan nasional diasosiasikan dengan sebab-sebab non sosial. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat peningkatan jumlah ilmuwan yang berimbas pada semakin meningkatnya jumlah informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan juga tidak terbatas pada publikasi tercetak saja. Gejala ini bertentangan dengan karakter perpustakaan nasional yang mempunyai kebijakan akses terbatas ke koleksinya.
- (2) Krisis tersebut semakin meningkat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan kemajuan kebudayaan, fenomena peningkatan jumlah informasi yang dibutuhkan secara langsung tercermin dalam produksi publikasi tercetak di seluruh dunia, yang peningkatan volumenya mendekati kecepatan eksponensial dan berjalan terus setiap tahun. Meningkatnya jumlah publikasi ini menghambat operasi perpustakaan nasional. Akuisisi bahan perpustakaan menjadi rumit menyangkut kontrol atau pengaturan untuk menjamin keluasan penerimaan kopi deposit publikasi nasional serta seleksi buku asing yang diperlukan perpustakaan. Pertumbuhan koleksi yang cepat menyebabkan terus meningkatnya kapasitas penyimpanan yang diperlukan untuk akuisisi baru. Ini berarti penambahan ruang simpan tidak seimbang dengan penambahan koleksi. Pengolahan, organisasi koleksi, pemeliharaan katalog menjadi sangat rumit. Akhirnya perpustakaan nasional tidak mampu menyediakan bahan perpustakaan bagi pembaca sesuai dengan jadwal dan dengan demikian tidak lagi efektif dalam menginformasikan literatur terbaru bagi pembacanya.
- (3) Perpustakaan khusus jumlahnya semakin bertambah dan semakin mapan karena memiliki pembaca yang terarah serta memiliki keunggulan dibandingkan dengan perpustakaan nasional dan perpustakaan lainnya. Keunggulan pertama terletak pada isi dan jenis koleksinya. Karena kekhususan cakupan subjeknya, maka perpustakaan khusus lebih leluasa dalam memilih

publikasi dengan cakupan lebih lengkap daripada perpustakaan lain. Perpustakaan khusus mulai memusatkan diri pada jurnal. Perpustakaan khusus memiliki keunggulan dalam kecepatan penghantaran bahan perpustakaan, penanganan sistem rujukan, serta pendayagunaan jasa informasi-referens, yang semuanya akan jauh lebih memuaskan pembaca dibandingkan dengan yang bisa didapat dari bentuk konvensional perpustakaan lain.

- (4) Adanya arah gejala kerja sama dan penciptaan sistem perpustakaan secara keseluruhan. Pustakawan di berbagai perpustakaan mulai merasa perlu memusatkan dan mengkoordinasikan aktivitas perpustakannya, yang dengan sendirinya mengarah pada perpustakaan nasional yang memiliki koleksi terbesar, keuangan cukup, personel yang berkualifikasi. Hal tersebut bertentangan dengan isolasionisme tradisional perpustakaan nasional serta sifat eksklusivitas postur perpustakaan nasional terhadap perpustakaan lainnya.

Kesulitan yang dihadapi perpustakaan nasional serta berkembangnya perpustakaan khusus menyebabkan lahirnya pendapat ketidaksetaraan (*incompatibility*) antara tuntutan baru perpustakaan serta fungsi tradisional perpustakaan. Bahkan ada yang menganggap perpustakaan nasional berada dalam posisi mandeg karena tugasnya sudah merupakan bagian masa lampau. Muncul pertanyaan mengenai kelayakan eksistensi masa depan perpustakaan nasional sebagai arsip publikasi nasional. Inilah krisis yang dihadapi perpustakaan nasional.

Di sisi lain, perpustakaan nasional memiliki ciri khas yang membenarkan eksistensi mereka dengan tidak memandang keunggulan perpustakaan khusus. Adapun ciri khas yang membenarkan eksistensi perpustakaan nasional ialah:

- (1) Fungsi tradisional perpustakaan nasional ialah akuisisi, penyimpanan dan pengorganisasian serta penggunaan koleksi nasional publikasi tercetak. Dalam hal ini tidak diragukan lagi pentingnya perpustakaan nasional.
- (2) Selama berabad-abad, perpustakaan nasional telah mengakumulasikan koleksi umum literatur asing yang tidak adaandingannya di negaranya;
- (3) Koleksi ini terdiri dari literatur yang mencakup bidang-bidang pengetahuan yang tidak dilayani perpustakaan khusus yang independen. Perpustakaan nasional juga memiliki publikasi bahasa langka yang tidak dapat dilayani oleh perpustakaan lain karena kelangkaan personel yang menguasai bahasa langka.
- (4) Pada masa pengembangan jasa perpustakaan, isu lebih parah terdapat pada sentralisasi, standarisasi dan koordinasi aktivitas perpustakaan pada skala nasional dan internasional. Dengan sendirinya tugas ini dipercayakan kepada perpustakaan nasional karena perpustakaan nasional yang kaya koleksi, memiliki fasilitas referens yang baik, keuangan cukup dan personel berkualifikasi.

Pada tahun 1950an, 1960an dan 1970an masalah perpustakaan nasional menjadi masalah kontroversial. Ada beberapa anggapan yang pernah muncul sebagaimana yang diuraikan berikut ini. Salah satunya adalah bahwa "Perpustakaan nasional adalah salah satu bagian terpenting dari sistem perpustakaan sebuah negara." Ada juga anggapan yang nadanya pesimistis, yaitu bahwa "Perpustakaan nasional adalah fenomena kuno, organisasi yang inefektif dan sekarat." "masa depan perpustakaan nasional ialah spesialisasi." Pendapat yang berlawanan: "Kekuatan perpustakaan nasional terletak pada sifat umum koleksinya." Kesenjangan pendapat dikarenakan oleh kondisi kompleksitas yang tidak lazim pada masa kini pada masa perpustakaan nasional beroperasi serta berbagai faktor yang menentukan perkembangannya.

Salah satu faktor yang paling menentukan ialah sifat khas ilmu pengetahuan modern tercermin dalam subjek publikasi tercetak serta isi permintaan pemakai yang mencerminkan ciri tujuan utama sistem perpustakaan. Perkembangan perpustakaan nasional sebagai sebuah bentuk perpustakaan penelitian diintegrasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebaliknya. Perkembangan ini semakin nyata dengan perkembangan zaman.

Diferensiasi dan integrasi, fusi dan fisi ilmu pengetahuan merupakan karakteristik ilmu modern. Karakteristik tersebut memiliki dampak langsung terhadap keluaran bahan perpustakaan tercetak dan elektronik, yang pada gilirannya, berimbas pada koleksi perpustakaan dan jenis pembacanya.

Diferensiasi ilmu pengetahuan mendorong penerbitan buku dengan subjek sangat khusus. Situasi ini merumitkan pelaksanaan akuisisi buku asing oleh perpustakaan nasional. Dengan membanjirnya terbitan semakin sulit bagi perpustakaan nasional untuk memilih buku dan majalah. Dalam kasus tertentu, perpustakaan khusus lebih memiliki keunggulan. Karena dibatasi oleh julatan disiplin yang pasti, maka perpustakaan khusus lebih mudah menetapkan keluasan dan kedalaman koleksinya.

Integrasi ilmu pengetahuan mendorong pertumbuhan publikasi dalam ilmu-ilmu yang berdekatan. Integrasi ilmu pengetahuan menyulitkan perpustakaan, karena memilih materi dalam bidang-bidang ilmu tersebut juga tidak mudah. Sebagai akibatnya, di kalangan perpustakaan khusus timbul kecenderungan untuk mengubah diri menjadi perpustakaan multicabang ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi pada perpustakaan khusus yang besar.

Fusi ilmu pengetahuan juga tercermin dalam jenis spesialisasi pemakai. Sejalan dengan spesialisasi ke bidang ilmu yang lebih sempit, diperlukan pengetahuan atau orientasi pada dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Minat pemakai yang semakin meningkat tampak pada publikasi cabang-cabang pengetahuan yang berkaitan.

Nyatalah bahwa permintaan literatur khusus oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan hanya dapat dipenuhi oleh perpustakaan khusus; pertanyaan yang berkaitan kompleks sebaiknya diwakili oleh koleksi perpustakaan yang lebih bersifat umum.

Jadi diferensiasi dan integrasi ilmu pengetahuan, spesialisasi dan hibridisasi peneliti berkaitan dengan 2 jenis perpustakaan penelitian yaitu perpustakaan penelitian khusus dan umum, Maka kesimpulannya ialah memenuhi permintaan peneliti masa kini hanya dimungkinkan oleh adanya aktivitas saling mengisi, terkoordinasi antara kedua jenis perpustakaan khusus. Dengan kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan menentukan penyusunan sistem perpustakaan.

Gagasan "sistem bersama" perpustakaan mula-mula muncul di Uni Soviet. Ditunjang oleh perencanaan nasional untuk perkembangand an panduan perpustakaan. Gagasan tersebut kemudian dilanjutkan di negara lain. UNESCO, FID, IFLA dan International Council on Archives (ICA) mengembangkan perencanaan nasional untuk infrastruktur dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan nasional. Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah bersama kearah pemecahan masalah berskala internasional.

1.5. Jenis perpustakaan nasional

Istilah perpustakaan nasional memiliki makna tersendiri dan khas bagi profesi. Lalu timbul pertanyaan mengapa sulit memberikan batasan apa yang disebut perpustakaan nasional. Dari ratusan perpustakaan nasional, bila dilihat sudut pandang taksonomi maka terdapat tiga jenis perpustakaan nasional. Sebagian besar perpustakaan nasional memberikan jasa unik; sebagian memiliki kedudukan primat di antara perpustakaan lain artinya perpustakaan utama dari perpustakaan yang ada dan ketiga semuanya menghadapi masalah yang dihadapi "perpustakaan nasional" pada masa kini.

1.5.1. Generasi pertama

Perpustakaan nasional dapat dibagi menjadi tiga jenis model, model pertama disebut generasi pertama. Generasi pertama merupakan perpustakaan nasional klasik, tradisional yang sama dengan apa yang disebut kepustakawanan Barat. Umumnya didirikan sebelum tahun 1800, adalah model tradisional Library of Congress, British Library, Bibliotheque Nationale. Jenis ini didirikan sebagai bagian nasionalisme, koleksinya mulai dengan akuisisi milik raja dan kaum bangsawan (Prancis, Austria, Denmark) atau akuisisi perpustakaan pribadi yang besar (misalnya koleksi Thomas Jefferson pada Library of Congress atau koleksi Sir Hans Soalne pada British Library). Setelah terbentuk, perpustakaan ini tumbuh pesat berkat adanya undang-undang deposit, kemudian menjadi dikaitkan dengan hak cipta atau izin menerbitkan perdagangan buku.

Berkat undang-undang deposit, koleksi perpustakaan nasional tumbuh meluas. Tidak ada seleksi buku; produksi sebuah karya dalam sebuah negara merupakan materi yang dengan sendirinya bagian dari rekaman warisan nasional. Meluasnya koleksi bergilir dengan keharusan menggunakannya di kalangan komunitas pandit. Langkah pertama ialah pengembangan pengawasan bibliografis agar koleksinya berguna. Ini kemudian merangsang munculnya bibliografi nasional, bibliografi khusus, katalog induk, standar bibliografi nasional, pelatihan profesional bagi pustakawan.

Besarnya koleksi perpustakaan bangsa menumbuhkan posisi mereka dalam kehidupan budaya bangsa. Perpustakaan nasional mencerminkan minat bangsa dalam aktivitas intelektual, maka itu perpustakaan nasional ditempatkan pada gedung yang megah. Sumbangan pribadi diberikan sehingga koleksi dan prestise mereka meningkat. Karena telah membeli semua pengetahuan terekam yang ditempatkannya pada sebuah tempat, maka perpustakaan nasional menjadi tempat paling efisien untuk penelitian. Jadi "one stop". Sudah tentu kuantitas penggunaan tidak sesuai dengan besaran koleksi serta laju penggunaannya berada jauh di bawah perpustakaan umum atau perguruan tinggi, namun kualitas penggunaan koleksi di perpustakaan nasional mencerminkan kependitan paling tinggi serta menarik ilmuwan paling cemerlang dari negara bersangkutan.

Karena memiliki prestise yang tinggi, maka kepala perpustakaan nasional diambilkan dari masyarakat. Maka kepala Library of Congress diambil dari ilmuwan (sejarahwan, penyair, misalnya Archibald McLeish dengan puisi "The young dead solders" yang banyak dikaitkan dengan puisi Chairil Anwar "Kerawang Bekasi"), Filipina (sejarahwan).

Keunggulan perpustakaan nasional generasi pertama bersifat superlatif. Perpustakaan nasional di Viena kaya akan papyrus, perpustakaan nasional Denmark

unggul pada saga Islandia, Irlandia memiliki lebih banyak *vellum* (Reading Room British Library) memiliki kubah yang besar. Di British Library muncul seorang pengunjung, kelak namanya terkenal sebagai Karl Marx. Perpustakaan nasional, khususnya di Eropa, memiliki sifat elit versi Eropa. Pengunjung harus membawa surat pengantar yang dibuat oleh orang lain yang pernah menggunakan koleksi perpustakaan nasional. Di mana-mana mahasiswa selalu dipersulit. Jasa seringkali didisain sedemikian rupa sehingga peneliti yang memiliki motivasi tertinggi saja yang dapat menggunakan koleksi. Waktu serah bahan perpustakaan sejak saat permintaan buku sampai ke penyerahan buku selalu melewati waktu 24 jam dan seringkali dalam hitungan harian. Sungguhpun demikian perpustakaan nasional generasi pertama menjadi pusat kepustakawanan di negara masing-masing, menjadi pelestari utama memori nasional dan mengembangkan penelitian dan kependidikan. Tradisi perpustakaan nasional generasi pertama menghasilkan perpustakaan nasional Generasi Kedua.

1.5.2. Generasi kedua

Perpustakaan nasional ini muncul antara periode Perang Napoleon dan Perang Dunia, jumlahnya sekitar 50an. Muncul pada awal abad 20, perpustakaan nasional berkembang sebagai lembaga yang sangat berbeda dengan perpustakaan nasional sebelumnya. Di Amerika Latin mulai sebagai koleksi literer dan historis, disimpan di gedung indah, namun karena seringnya pergantian pemerintahan dan perpindahan maka selalu kekurangan anggaran dan staf. Gedung perpustakaan yang berada di tengah-tengah kota menjadi ajang pertempuran dan revolusi karena lokasinya gedung perpustakaan dikuasai pihak yang bersengketa untuk keperluan pertempuran. Maka akibatnya koleksi perpustakaan nasional tersebar kemana-mana sehingga harus membuat gedung baru. Dengan demikian perpustakaan nasional Amerika Latin baru dalam koleksi dan jasa namun tua dalam sejarahnya.

Banyak perpustakaan nasional mulai sebagai bagian pemerintahan serta didirikan untuk membantu parlemen. Canada, Australia, New Zealand memusatkan koleksinya untuk membantu legislatif, dari situ baru berkembang ke ilmu pengetahuan dan humaniora. Pendirian Perpustakaan nasional jenis berikutnya ialah bersamaan dengan perkembangan perpustakaan pendidikan dan komunitas (Swiss, Yunani, Israel) sehingga perpustakaan nasional bersaing dengan lembaga lain dalam mencari dana serta perhatian dari pemerintah. Perpustakaan nasional jenis ini, karena dipaksa oleh keadaan, hanya memusatkan jasanya yang hanya mampu dilayani oleh koleksi nasional pusat. Jasa lain diserahkan kepada perpustakaan perguruan tinggi dan umum. Jasa bibliografis sudah lazim, umumnya perpustakaan nasional ini mengakumulasi sejarah dan keberhasilan sebuah negara namun koleksi yang besar jarang yang terealisasikan.

Karena seringkali perang, perubahan pemerintahan dan perubahan tujuan, maka perpustakaan nasional mengubah tujuan dan sasaran. Masing-masing perpustakaan nasional memilih tujuan masing-masing, kemudian mengembangkannya. Koleksi masing-masing perpustakaan nasional bervariasi, dari koleksi perpustakaan nasional Bolivia yang hanya 150,000 (1988) sampai ke Perpustakaan Lenin Uni Soviet (28,2 juta), Gedungnya juga bervariasi, perpustakaan nasional Tunisia semula penjaja (vendor) lalu digunakan sebagai barak militer sementara National Library of Canada memiliki gedung baru yang megah.

Perpustakaan nasional negara Sosialis lazimnya memiliki organisasi dan program yang sama. Masing-masing perpustakaan nasional bertindak sebagai pusat deposit buku bagi negara yang bersangkutan, perpustakaan umum pusat untuk

negara serta pusat pelatihan pustakawan.

Pada akhir periode ini muncul teknik baru guna mengatasi masalah penggunaan, penyimpanan dan penunjang. Divisi perpustakaan nasional dibagi menjadi elemen terpisah yang letaknya terpencar. British System mengenal National Library of Wales (1909) dan National Library of Scotland (1925). Di Italia perpustakaan nasional dibagi-bagi di antara perpustakaan yang mapan di Florence, Napoli, Roma, Venezia, Parlemo dan Torino. Di Yugoslavia perpustakaan nasional terdapat di Belgrado, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skopje dan Cetinje.

1.5.3. Generasi ketiga

Sangat berbeda dengan perpustakaan nasional sebelumnya, tujuannya sangat berbeda. Bila perpustakaan nasional yang lebih tua mulai memulai dengan koleksi yang diwariskan dan tumbuh sekitar buku, maka perpustakaan nasional yang baru menggambarkan perpustakaan nasional sebagai sistem terpadu, dikembangkan penuh, biasanya bermarkas besar diibu kota negara namun menjangkau perpustakaan provinsi dan lokal. Perpustakaan nasional biasanya menyelenggarakan sebuah sekolah perpustakaan, meminjamkan buku dan menyelenggarakan bibliografi nasional. Seringkali perpustakaan nasional diciptakan untuk memenuhi kebutuhan central point deposit dokumen internasional (PBB, WHO, Unesco, organisasi internasional lainnya) serta central point pertukaran internasional dan penerimaan hibah buku dari luar negeri.

Beberapa perpustakaan nasional mulai sebagai lembaga pemerintah (Nigeria, National Diet Library Jepang), kemudian menerima tanggung jawab yang lebih besar, akhirnya berkembang sebagai pusat jaringan utama akuisisi dan pengunaan buku.

Ada yang mulai dari perpustakaan universitas dengan anggapan bahwa koleksi riset tradisional lebih tepat bila menjadi koleksi perpustakaan perguruan tinggi (Uganda, Ethiopia, Sri Langka, Sudan), perpustakaan nasional sebaiknya menjadi pusat jaringan perpustakaan umum dan membantu aktivitas pemerintah pada aras nasional, provinsi dan lokal.

Rujukan, penelitian dan rekod pengalaman nasional merupakan milik sistem pendidikan. Pola ini diikuti oleh Islandia, Norwegia, Israel Ceko, Slovakia).

Perpustakaan nasional yang merupakan inti konfigurasi perpustakaan umum Kementerian Pendidikan terdapat di Panama, Guatemala, Ghana. Di Malaysia, Libya, Tunisia, perpustakaan nasional menjadi gudang buku peminjaman dan distribusi buku, sedangkan di Colombia, El Salvador, dan Singapura, perpustakaan nasional membuka cabang perpustakaan nasional di pusat-pusat kota.

1.6. Asal usul perpustakaan nasional

Adapun asal usul perpustakaan nasional ialah sebagai berikut :

- (1) Merupakan kumpulan berbagai perpustakaan yang disita negara semasa revolusi, kemudian koleksi gabungan itu dijadikan satu di bawah atas perpustakaan nasional. Contoh Bibliotheque Nationale di Paris dan Perpustakaan Negara Lenin di Moskow.
- (2) Perpustakaan tersebut dibangun semasa damai. Contoh "Reference Division" dari The British Library di London.
- (3) Sengaja dibentuk, lazimnya dengan dekrit pemerintah. Contoh Perpustakaan Nasional di Jakarta, dibentuk berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan kemudian dengan keputusan Presiden menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Contoh lain ialah National Library of Canada.

- (4) Sebagai bagian sebuah badan legislatif, kemudian berfungsi sebagai perpustakaan nasional. Namun tetap terikat tugas semula, lebih mengutamakan layanan pada badan legislatif. Contoh Library of Congress, National Library of Scotland.
- (5) Sebagai perkembangan lanjut sebuah perpustakaan umum, kemudian dikembangkan menjadi perpustakaan nasional. Seringkali perpustakaan nasional masih berfungsi sebagai perpustakaan umum. Contoh Singapore National Library, Perpustakaan nasional Malta, Perpustakaan nasional Mesir.
- (6) Bermula sebagai bagian sebuah museum, kemudian dijadikan cikal bakal perpustakaan nasional. Misalnya The British Library, Perpustakaan Nasional Indonesia, semula merupakan bagian Museum Nasional.
- (7) Berasal dari perpustakaan khusus, kemudian berfungsi sebagai perpustakaan nasional dalam subjek yang dikuasainya. Contoh National Agricultural Library dan National Library of Medicine, kedua-duanya di Amerika.
- (8) Sebagai kelanjutan sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Contoh perpustakaan nasional Birma, semula berasal dari koleksi University of Burma.

1.7. Fungsi tunggal dan ganda perpustakaan nasional

Perpustakaan nasional fungsi ganda dalam arti tidak saja berfungsi sebagai perpustakaan nasional melainkan juga berfungsi sebagai jenis perpustakaan lain.

1.7.1. Perpustakaan nasional kultural

Contoh untuk perpustakaan nasional jebnis ini adalah: Bayerische Staatsbibliothek, National Library of Scotland, dan National Library of Wales. Ketiga perpustakaan nasional tersebut memberikan jasa pada sejumlah daerah administratif yang memiliki kaitan politik dan kultural, jadi merupakan subkategori kultural perpustakaan nasional. Berdasarkan konsep tersebut, maka di dalamnya termasuk berbagai perpustakaan nasional di republik Soviet otonom, perpustakaan nasional Slovak, perpustakaan nasional Yugoslavia; beberapa di antaranya sebelumnya merupakan bagian dari negara lain atau semula merupakan daerah yang independen. Perpustakaan nasional kultural mungkin melewati batas nasional, seperti Perpustakaan Nasional Wales yang mengumpulkan budaya Celtic pada umumnya.

1.7.2. Perpustakaan tujuan ganda (*dual-purpose libraries*)

Perpustakaan memiliki tujuan ganda, satu sebagai perpustakaan nasional dan satunya sebagai jenis perpustakaan lain. Bayerische Staatsbibliothek juga memiliki nama sebagai Land- und StadtBibliothek (perpustakaan negara dan kota), berfungsi sebagai perpustakaan rujukan regional, dapat dianggap sebagai perpustakaan yang menduduki dua lapis (*tier*). Satu lapis di bawahnya disebut Stadtbucherein (perpustakaan umum populer). Ada perpustakaan yang memiliki fungsi dua atau tiga. Perpustakaan universitas di kota Hamburg dan Bremen bertindak sebagai perpustakaan negara, perpustakaan rujukan kota, pemegang hak deposit dan menyimpan katalog induk regional.

1.7. 2.1. Perpustakaan perguruan tinggi nasional.

Di sini perpustakaan nasional juga berfungsi sebagai perpustakaan perguruan tinggi. Contoh Perpustakaan Universitas Helsinki, Perpustakaan Nasional Oslo, Perpustakaan Universitas dan Nasional Kroasia di Zagreb dan Jewish National and University Library di Jerusalem. Perpustakaan universitas menganggap edkua tugasnya sama pentingnya walaupun dalam praktek kewajiban mereka

terhadap universitas lebih utama daripada fungsi mereka sebagai perpustakaan nasional atau regional atau kota.

1.7. 2.2. Perpustakaan umum nasional.

Singapore National Library, Federal National Library di Calcutta.

1.7. 2.3. Perpustakaan parlementer nasional.

Perpustakaan nasional juga bertindak sebagai perpustakaan lembaga legislatif. Contoh National Diet Library dan Library of Congress. National Diet Library mengambil model Library of Congress sebagai akibat pendudukan AS atas Jepang. Perpustakaan nasional didirikan tahun 1948 sebagai perpustakaan multitujuan karena di samping memiliki perpustakaan di parlemen juga memiliki 30 perpustakaan cabang di departemen dengan tujuan memaksimalkan bahan perpustakaan serta membantu Diet mengontrol birokrasi eksekutif.

1.7.3. Perpustakaan subjek nasional

Meningkatnya jumlah publikasi menyebabkan perpustakaan nasional tidak mampu menangani informasi terekam dengan tidak memandang asalnya. Maka dikembangkanlah perpustakaan subjek nasional. Perpustakaan nasional subjek dapat mencakup seluruh bidang sains dan teknologi dapat juga terbatas pada satu bidang ilmu saja. Contoh yang mencakup seluruh bidang sains dan teknologi ialah National Lending Library for Science and Technology (Inggris) sedangkan yang hanya memusatkan pada subjek tertentu saja meliputi National Library of Medicine, National Agricultural Library, Slovak Central Technical Library di Bratislava. Sebuah perpustakaan universitas juga dapat berfungsi sebagai perpustakaan subjek nasional, misalnya Lund University Library (Sweden), di Jerman Technische Informationsbibliothek di Hanover Technical University merupakan perpustakaan teknik pusat dan pusat terjemahan nasional. Perpustakaan subjek nasional lainnya ialah Central Medical University di Cologne University, Central Agricultural Library di Bonn University, Institute of International Economics di Kiel University. Di Inggris ada perpustakaan yang memiliki nama yang sudah mengarah ke subjek yang ditekuninya di samping melayani komunitas. Sebagai contoh, Robert B. Haas Family Arts Library di Yale dan Victoria and Albert Museum di Kensington di London.

1.7.4. Perpustakaan peminjaman dan referens

Koleksi perpustakaan nasional digunakan untuk keperluan rujukan atau peminjaman, baik langsung atau melalui perpustakaan lain. Perpustakaan nasional dapat merupakan perpustakaan peminjaman, mengirimkan dokumen yang diperlukan ke perpustakaan dan organisasi lain. Dalam hal ini, fungsi peminjaman dan referens dialokasikan pada dua lembaga yang berbeda. Contoh di Inggris, British Museum Library^{2[2]} merupakan perpustakaan rujukan umum nasional, National Central Library merupakan perpustakaan peminjaman umum nasional; ada pula National Reference Library for Science and Invention (bagian terpisah dari British Museum Library) dan National Lending Library for Science and Technology.

1.7.5. Perpustakaan nasional untuk pembaca tunanetra

Library of Congress merupakan perpustakaan nasional umum yang menyediakan materi bacaan untuk penderita cacat, khususnya mereka yang secara

^{2[2]} Semula merupakan bagian British Museum, kemudian dilebur menjadi British Library. British Library dibentuk tahun 1973 merupakan gabungan antara British Museum Library, National Central Library, National Lending Library for Science and Technology, British

fisik tidak dapat membaca atau menggunakan materi tercetak biasa. Lembaga serupa terdapat di Inggris bernama National Library for the Blind disingkat NLB. NLB menyediakan materi bacaan dalam huruf Braille dan Moon, huruf yang dapat dibaca oleh tuna netra. Perpustakaan umum bagi kaum tunanetra dibuka tahun 1882.

BAB 2

PERPUSTAKAAN SEBELUM TAHUN 1942

2.1. Pendahuluan

Sebelum mengenal kertas yang dibawa Belanda, kerajaan di Indonesia menggunakan bahan kertas yang disebut *deluwang*. Bahan tersebut dibuat dari pohon deluwang yang tumbuh di beberapa daerah, seperti: Ciamis, Surakarta, Palu dan Tapanuli. Bahan tulis lain yang digunakan adalah *karas*, yaitu semacam batu tulis atau bambu yang dibelah¹, dan lempeng tembaga. Selain itu ada juga prasasti yang ditulis pada sebuah batu. Sejak masa pemerintahan Kerajaan Kadiri sampai dengan Majapahit telah dihasilkan banyak karya sastra, yang beberapa di antaranya masih sintas sampai sekarang. Setelah Islam masuk Indonesia, disusul dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di negeri ini, telah dihasilkan juga banyak karya tulis berupa manuskrip, suluk, buku kuning, dan sebagainya.

Munculnya manuskrip dalam wujud serat, kakawin, buku kuning, suluk dan sejenisnya ditafsirkan oleh beberapa penulis, di antaranya Hardjoprakoso, sebagai tanda bahwa perpustakaan telah ada di Indonesia sejak abad X. Memang diketahui bahwa banyak manuskrip yang dihasilkan, sebagian besar disimpan di istana dan rumah ibadah dan diatur untuk keperluan pengajaran keagamaan, namun hal itu tidak membuktikan adanya sebuah perpustakaan. Keberadaan manuskrip, sistem yang digunakan serta adanya pemakai memang sulit disangkal, namun tidak ada bukti tertulis tentang hal tersebut, sehingga menimbulkan tafsiran bahwa perpustakaan dalam arti sesungguhnya belum ada di Indonesia pada abad X.

2.2. Perpustakaan awal abad 17

Perpustakaan pertama di Indonesia yang tercatat adalah sebuah perpustakaan gereja di Batavia yang sesungguhnya telah dirintis sejak tahun 1624². Namun akibat berbagai kendala baru diresmikan pada 27 April 1643, bersamaan dengan pengangkatan pendeta Ds (Dominus) Abraham Fierenius sebagai kepalanya. Pada masa itu layanan peminjaman buku yang diselenggarakan perpustakaan gereja Batavia tersebut tidak hanya dibuka untuk perawat rumah sakit Batavia, namun juga untuk pemakai yang berada di Semarang dan Juana. Setelah itu tidak terdapat catatan tentang keberadaan perpustakaan di Indonesia untuk waktu yang cukup lama.

Perpustakaan di Indonesia yang tercatat keberadaannya setelah itu adalah perpustakaan milik Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Perpustakaan ini didirikan pada 24 April 1778, semasa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen berdiri atas prakarsa Mr J.C.M. Rademaker, ketua Raad van Indie. Organisasi tersebut mengandalkan sumbangan dermawan serta bantuan keuangan dari Raad van Indie.

2.3. Perpustakaan pada masa Hindia Belanda

2.3.1. Perpustakaan khusus

Ketika VOC bubar tahun 1799, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen tetap beroperasi dengan mengandalkan sumbangan dermawan dan *gubernemen*. Perpustakaan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 2:252

² "Bibliotheken," dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, 2e dr ('sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1927), 5:118-119

Wetenschappen mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia dengan judul *Bibliotecae Artiumcientiarumquae Batavia Floret Catalogue Systematicus*, hasil suntingan P.Bleeker. Edisi kedua terbit tahun 1848³ dengan judul dalam bahasa Belanda.

Karena dianggap berhasil dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya bahasa, ilmu bumi dan antropologi di Hindia Belanda, dan mampu menerbitkan *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* serta *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* secara teratur, maka pada tahun 1924 nama perhimpunan tersebut mendapat tambahan Koninklijk, sehingga menjadi Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Perpustakaan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen merupakan perpustakaan khusus karena koleksinya bersifat khusus serta pemakainya terbatas pada peneliti. Ketika pemerintah Belanda meluncurkan Sistem Tanam Paksa (*Cultuur stelsel*) muncullah perkebunan dan balai penelitian bidang pertanian. Sistem Tanam Paksa secara tidak langsung mendorong pendirian perpustakaan penelitian bidang pertanian serta tumbuhnya majalah pertanian di Indonesia⁴. Salah satu perpustakaan pertanian yang paling tua serta masih sintas sampai saat ini ialah Bibliotheek's Lands Plantentuin te Buitenzorg⁵ yang didirikan pada tahun 1842. Pada tahun 1911 namanya diubah menjadi Centra Natuurwetenschappelijke Bibliotheek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Nama tersebut kemudian diubah lagi menjadi Biblioteca Bogoriensis. Perpustakaan khusus yang lain dapat diperiksa pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1. PERPUSTAKAAN KHUSUS

Nama instansi	Kota	Tahun berdiri	Jumlah koleksi	Subjek
Biblioteca Bogoriensis	Buitenzorg	1842		
Koninklijk Natuurkunde Vereeniging	Batavia	1850		Ilmu alam
Hoofdkantoor van de Topografische Dienst	Batavia	1865	5.000	Geodesi
Koninklijk Magnetische en Meteorologisch Observatorium	Batavia	1860		Geodesi, meteorologi
Dients van Mijnbouw	Bandoeng	1872	20.000	Pertambangan
Proefstation van der Java Suikerindustrie	Pasoeroean	1887	25.000	Pertanian tropis khususnya tebu
Departement van Economisch Zaken	Buitenzorg	1887		Ilmu pengetahuan alam
Hoofdkantoor van het Kadaster	Batavia	1905	2.430	Geografi
Dienst van Volksgezondheid	Batavia	1911	7.600	Kesehatan masyarakat
Nederlandsch Indisch Art School	Soerabaia	1913	7.500	Kedokteran
Geweestelijke Bibliotheek	Ambon	1914	2.987	
Volkslectuur	Batavia	1918	5.000	Kebudayaan Indonesia
Volksraad	Batavia	1918	19.938	Sosial, ekonomi
Technische Hoogeschool*	Bandoeng	1920	19.938	Teknik
Centraale Kantoor van Statistiek	Batavia	1921	62.000	Sosial ekonomi, statistik
Kantoor van Arbeid	Batavia	1921	3.000	Ketenagakerjaan

³ Sulisty-Basuki, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)p.10-12

⁴ Sulisty-Basuki, "Perkembangan majalah pertanian pada zaman Hindia Belanda, 1821-1942."

⁵ Periksa Surja Mansyur.

Departement van Marine	Batavia	1927	9.000	Pelayaran
Kirtya Liefriink Singaradja	Singaradja	1928		Kebudayaan Jawa dan Bali
Middenstands Vereniging	Soerabaia	1929	1.600	Reklame
Ahmadjah Beweging Indonesia	Batavia	1930	200	Islam
Cultuurtechnisch Instituut	Menado	1930	1.000	Pertanian
Java Instituut	Jogja	1935	5.000	Kebudayaan Bali, Jawa, Madura
Gouverneurskantoor	Makassar	1938		Perundang-undangan
Adriani-Kruyt Instituut	Menado	1938	650	Karesidenan Menado
Gewestelijk Bibliotheek Residentie Kantoor	Bandjarmasin	1919	3.019	Bahasa, sejarah
Hoogerrechtshof	Batavia		3.000	Perundang-undangan, jurisprudensi
Nederlandsch Zendings Vereeniging	Bandoeng		5.000	Teologi, penginjilan
Raad van Justitie	Batavia		400	Hukum
Proefstation West Java	Buitenzorg		3.000	Tanaman

Sumber: *Nieuwsblad voor den Boekhandel in Nederlandsch Oost Indie*, Juni 1941:41-2

Catatan: *Perpustakaan sekolah tinggi dimasukkan ke jenis perpustakaan khusus

2.3.2. Perpustakaan sekolah

Pemberlakuan Tanam Paksa membawa keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda namun membawa kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Terjadi bencana kelaparan di berbagai tempat, misalnya di Purwodadi. Berbagai kesengsaraan yang dialami bangsa Indonesia tersebut menimbulkan kritikan pedas dari kalangan Parlemen Belanda disertai tuntutan untuk membalas hutang budi penduduk Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan kebijakan hutang budi yang diwujudkan dalam bentuk *Etisch Politiek* (Politik Etis), terdiri dari irigasi, transmigrasi dan edukasi. Dalam kaitannya dengan edukasi, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah bagi pribumi yang dinamakan *volkschool* (sekolah rakyat), yang menerima tamatan sekolah rendah angka dua (*ongko loro*). Perpustakaan pada *volkschool* disebut *volksbibliotheek* dengan koleksi dipasok oleh *Volkslectuur* (kelak berubah menjadi Balai Pustaka).

Volksbibliotheek melayani bacaan bagi guru, murid dan penduduk sekitar sekolah. Pelayanan untuk penduduk sekitar ini merupakan langkah maju karena dengan demikian perpustakaan sekolah sudah terlibat dalam kegiatan komunitas, sesuatu yang baru dilancarkan UNESCO enam puluh tahun kemudian. Murid dan guru tidak dipungut bayaran⁶, sedangkan komunitas setempat harus membayar 2,5 sen untuk dua buku yang dipinjam selama dua minggu. Karena *volkschool* berada di bawah wewenang Kantor Pendidikan, maka secara berkala inspektur sekolah memeriksa perpustakaan yang mencakup inventaris peprustakaan serta data peminjaman.

Untuk *Volksbibliotheek Jawa* artinya *volkschool* yang berada di lingkungan etnik Jawa, pemerintah Hindia Belanda menyediakan 417 judul buku berbahasa Jawa serta 282 buku berbahasa Melayu. Untuk *Volksbibliotheek Sunda*, pemerintah Hindia Belanda menyediakan 291 judul buku berbahasa Sunda serta 282 buku berbahasa Melayu. Untuk *Volksbibliotheek Madura* disediakan 67 judul buku dalam bahasa Madura serta 282 judul dalam bahasa Melayu. Untuk *Volksbibliotheek Melayu*, setiap perpustakaan sekolah memperoleh 328 judul buku berbahasa melayu. Adapun jumlah *Volksbibliotheek* terdapat pada Tabel 2.2.

⁶ Wawancara dengan Nyonya Moeriddjah Hardjito, pustakawan cum guru pada *Volksbibliotheek* tahun 1934.

TABEL 2.2. JUMLAH VOLKSBIBLIOTHEEK

Wilayah	1937	1938	1939
Jawa Barat	466	466	466
Jawa Tengah	479	475	476
Jogjakarta	73	73	71
Surakarta	94	94	96
Jawa Timur	610	611	608
Sumatera	359	359	362
Borneo	60	60	58
Timur Besar (Groote Oost)	198	198	197
Jumlah	2335	2335	2336

Sumber: *Nieuwsblad voor den Boekhandel in Nederlandsch Oost Indie* 2 (5) Mei 1935:35

2..3.3. Perpustakaan umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang didanai oleh dana publik untuk kepentingan publik serta kebaikan publik. Pengertian publik di sini dapat diganti dengan istilah umum⁷. Pada zaman Hindia Belanda sebenarnya tidak ada perpustakaan umum yang didanai oleh anggaran pemerintah. Perpustakaan umum justru didirikan oleh pihak swasta. Perpustakaan umum yang didirikan oleh swasta disebut *openbare leeszaalen*, artinya ruang baca terbuka atau ruang baca (untuk) umum. Adapun lembaga yang mendirikan *openbare leeszaalen* adalah Gereja Katolik, Loge der Vrijmetselaren, Theosofische Vereeniging dan Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Tabel 2.3. menyuguhkan data *openbare leeszaalen*.

TABEL 2.3. OPENBARE LEESZALEN

Nama	Tahun	Koleksi	Keterangan
1. Openbare leeszaalen en bibliotheek, Malang	1914	8,890	Tahun 1930diambil alih oleh Maconieke Loge
2. Openbare leeszaalen Semarang	---	---	Gedung masih ada, digunakan sebagai oleh Badan Peprustakaan Jawa tengah
3. Openbare leeszaalen, Soerabaia	1920	30,000	
4. Bataviaasche Leesbibliotheek, Batavia	1864	16,000	Perpustakaan umum tertua. Bekasnya kini menjadi Gedung Dep. Pariwisata dan Kebudayaan
5. Openbare bibliotheek, Medan	1922	5,250	
6. Openbare leeszaalen, Makassar	1938	---	
7. Algemeen openbare leeszaal en bibliotheek, Yogyakarta		---	---

Sumber: *Nieuwsblad voor den Boekhandel in Nederlandsche Oost Indie*, 2 (6) Juni 1941:45

2.3.4. Perpustakaan sekolah tinggi

Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mendirikan universitas dalam arti sesungguhnya. Yang mereka dirikan ialah semacam sekolah tinggi. Justru yang pertama kali berdiri ialah Technische Hoogeschool yang didirikan pada tahun 1918 dan kemudian resmi menjadi sekolah tinggi pada tahun 1920. School tot Opleiding voor Indische Aarts (STOVIA) di Surabaya, Rechts Hogeschool di Batavia (1924) serta Geneeskunde Hogeschool di Batavia (1927), Faculteit van Landbouw Wetenschappen en Wijsgebeerte di Buitenzorg (Bogor) pada tahun 1941 dan terakhir Faculteit van Letterkunde di Batavia (1941). Kesemuanya memiliki semacam

⁷ International Federation of Library Associations and Institutions. (1986). *Guidelines for public libraries: prepared for the IFLA Section of Public Libraries*. The Hague: IFLA

perpustakaan fakultas. Ketika pemerintah Indonesia membentuk Universiteit Indonesia tahun 1950, kesemua sekolah tinggi dan *faculteit* itu berubah menjadi fakultas. Penyatuan itu yang menyebabkan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dimulai dari perpustakaan fakultas baru menyatu menjadi perpustakaan universitas.

2.3.5. Perpustakaan sewa

Pada zaman sebelum perang (1942) Indonesia mengenal perpustakaan sewa, disebut *huurbibliotheek*. Pada awalnya *openbare leeszaal* dengan *huurbibliotheek* sering "bersaing" dalam memenuhi kebutuhan bacaan pemakainya, kemudian secara alamiah terjadi penjurusan yang berbeda. Bila *openbare leeszaal* lebih banyak menyediakan bacaan ilmiah dan ilmiah populer, maka *huurbibliotheek* cenderung menyediakan bacaan berupa roman dalam bahasa Belanda, Inggris dan Prancis serta buku untuk remaja.

Huurbibliotheek terdapat di Batavia, Soerabaia, Malang, Jogjakarta, Madioen dan Solo, dikelola oleh penerbit forma G. Kolff & Co. Toko buku Visser mendirikan *huurbibliotheek* di Bandoeng. *Huurbibliotheek* lainnya ialah Viribus Unitis di Batavia, C.G. van Wijhe di Soerabaia serta Leesbibliotheek Favoriet di Batavia. Lazimnya ketiga perpustakaan sewa yang disebut terakhir ini menyediakan bahan bacaan yang dibeli dari pedagang buku loakan serta berbagai roman kuno yang dibeli dari tangan kedua sehingga peranan mereka dalam persewaan buku tidaklah maknawi.

Di samping persewaan buku, ada juga persewaan naskah di Batavia yang diselenggarakan oleh penulis Moehammad Bakir yang pada tahun 1897 mengelola sebuah perpustakaan sewa naskah di Pecenongan. Naskah disewakan bagi umum dengan imbalan sekitar 10 sen per malam disertai himbauan agar jangan terkena ludah siri atau minyak lampu teplok! Perpustakaan serupa terdapat juga di Palembang dan Banjarmasin.

2.3.6. Perpustakaan lain

Masih ada perpustakaan lain, yaitu yang didirikan oleh kraton, misalnya perpustakaan Radyo Poestoko di Yogyakarta dan perpustakaan serupa di lingkungan Mangkunegaraan, Surakarta. Di pulau Penyengat sekitar akhir abad 18 diketahui adanya sebuah perpustakaan umum yang didirikan oleh penguasa setempat.

Jadi ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, di Hindia Belanda sudah terdapat empat jenis perpustakaan kecuali perpustakaan nasional.

2.4. Perpustakaan pada masa Pendudukan Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang tidak ada kegiatan kepastakawanan, karena Jepang mengerahkan semua tenaga untuk keperluan mesin perang. Pada awal kekuasaannya, Jepang melarang peredaran buku berbahasa Belanda, Inggris dan bahasa Eropa lainnya. Semua sekolah tinggi ditutup. Baru ketika Jepang mulai terdesak beberapa sekolah tinggi dibuka kembali, untuk keperluan Jepang.

2.5. Tinjauan

Bila melihat perkembangan sejarah perpustakaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sampai masa kemerdekaan pun belum ada perpustakaan nasional di Indonesia. Yang ada hanyalah empat jenis perpustakaan yaitu perpustakaan umum, sekolah, khusus dan perguruan tinggi. Bahwa hanya ada empat jenis perpustakaan sedangkan perpustakaan nasional tidak ada sampai tahun 1945 menimbulkan pertanyaan benarkah memang tidak ada perpustakaan nasional?

Untuk menjawab pertanyaan ada tidaknya perpustakaan nasional di Indonesia, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut ialah pendekatan fungsi, konsep, koleksi dan kelembagaan.

Pendekatan fungsi artinya penggunaan fungsi sebuah perpustakaan nasional. Yang utama ialah fungsi deposit yang artinya penyimpanan terbitan sebuah negara berdasarkan undang-undang yang mewajibkan pengirim atau penerbit mengirimkan contoh cetakan atau terbitannya ke perpustakaan yang ditunjuk. Pendekatan konseptual artinya penelitian mengenai bila dan oleh siapa konsep sebuah perpustakaan nasional mulai dikemukakan di Indonesia. Konsep tersebut harus dituangkan dalam sebuah terbitan atau pertemuan. Pendekatan koleksi artinya penelitian mengenai koleksi inti atau koleksi siapa saja yang menjadi awal dari koleksi perpustakaan nasional. Sebagai contoh koleksi Thomas Jefferson merupakan inti bagi koleksi Library of Congress atau koleksi The Bodleian Library merupakan dasar koleksi The British Library. Pendekatan lembaga artinya analisis lembaga yang bertindak selaku sebuah perpustakaan nasional berdasarkan sebuah produk perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka penulis akan menerapkannya terhadap perpustakaan yang ada dan pernah ada di Indonesia.

BAB 3

PENDEKATAN FUNGSI

3.1. Pendahuluan

Bila melihat bahwa fungsi utama sebuah perpustakaan nasional ialah pengumpulan bahan perpustakaan terbitan sebuah negara, maka pendekatan fungsi tersebut dapat diterapkan pada sejarah Perpustakaan Nasional RI. Dengan kata lain, fungsi utama lembaga tersebut ialah mengumpulkan dan melestarikan literatur nasional dengan sasaran selengkap mungkin.

Bila pendekatan fungsi yang digunakan, maka fungsi mengumpulkan dan melestarikan literatur nasional harus dicari pada perpustakaan yang telah melaksanakannya. Hal ini berarti tinjauan harus dimulai dari masa silam.

3.2. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen didirikan oleh sejumlah pejabat Vereenigde Oost Indie Compagnie (selanjutnya disingkat VOC) dan warga Belanda yang bermukim di Batavia. Pendirian Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dipelopori oleh seorang naturalis bernama Jacob Cornelis Matthieuw Radermacher. Komunitas tersebut menyadari bahwa kelangsungan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan¹ sangat bergantung pada bantuan penguasa, dalam ini pembesar VOC. Untuk keperluan itu para pendiri menggunakan dua pendekatan². Pendekatan pertama para petinggi VOC dihimbau agar bersedia terlibat dalam pengurusan administrasi dengan harapan izin resmi pendirian lembaga dapat diperoleh. Dengan adanya persetujuan resmi, maka Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen akan menjadi organisasi terbuka³. Di samping itu, dengan meminta izin dari penguasa, maka Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen menciptakan hubungan baik dengan penguasa yang berlangsung sampai akhir hayat organisasi.

Keterlibatan penguasa pada badan baru tersebut berbeda-beda tingkatannya, tergantung pada perubahan politik dan administrasi pemerintah Hindia Belanda⁴ di samping juga pada apakah organisasi itu sendiri ingin mendekat atau menjauh dari penguasa. Sebelum tahun 1795 persetujuan diberikan oleh Heeren van Zeventien⁵ serta wakil VOC di Batavia (dalam hal ini Gubernur Jenderal). Kedekatan hubungan dengan penguasa tersebut berubah-ubah sejalan dengan kenyataan bahwa sepanjang sejarah Indonesia mengalami penjajahan oleh penguasa yang berbeda-beda. Pada tahun 1800-1811 Indonesia diperintah oleh Republik Bataafs⁶, kemudian 1811-1816⁷ oleh *interegnum* East India Company, dan sejak 1817 diperintah oleh pemerintah Belanda yang berganti nama menjadi pemerintah Hindia Belanda.

¹ Di sini ilmu pengetahuan dalam arti luas, lebih luas daripada arti *science* dalam bahasa Inggris. Istilah Belanda *wetenschappen* mirip dengan *Wissenschaften* yang bermakna ilmu pengetahuan dalam arti luas mencakup ilmu pengetahuan alam, teknologi dan sains dalam konteks Inggris.

² Periksa Hans Groot, Van de Groote River naar het Koningsplein: Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1778-1867. Disertasi Leiden Universiteit – 2006.

³ Hal ini berbeda dengan Vrij Masonrij (Free Masons) yang berdiri 15 tahun sebelumnya yang tetap bersifat organisasi tertutup.

⁴ Ketika Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dibentuk, yang berkuasa di Batavia adalah VOC. VOC ini bubar tahun 1799, semua hutang piutangnya diambil alih pemerintah Bataaf yang waktu itu menjadi perpanjangan tangan Napoleon.

⁵ Direktur VOC berjumlah 17 orang

⁶ Salah seorang wakilnya yang terkenal ialah Herman Willem Daeendels yang membangun Jalan Raya Pos. Periksa terbitan *Kompas...* disertasi Djoko Marihandono,

⁷ Salah seorang Letnan Gubernurnya amat berminat terhadap kebudayaan termasuk naskah Jawa. Dia adalah Thomas Stamford Raffles

Para pendiri lembaga tersebut juga menyadari bahwa persetujuan dari penguasa saja tidak cukup. Mereka juga minta bantuan penguasa. Maka antara 1779-1839, makalah dan buku tahunan (*jaarboek*) dicetak di percetakan milik pemerintah (*Staats drukkerij*) untuk kemudian diserahkan ke penerbit swasta.

Penguasa membantu Badan mula-mula dengan sirkuler 1788, kemudian meningkat menjadi beberapa keputusan menyangkut penyerahan dokumen ke badan tersebut termasuk bantuan keuangan.

3.3. Zaman Permerintahan Hindia Belanda

Setelah kekuasaan East India Company (EIC) berakhir pada tahun 1817⁸, Indonesia sedikit demi sedikit kembali dikuasai Belanda. Penguasa setempat dipaksa untuk menandatangani *Korte Verklaring* dan *Lange Verklaring* yang mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada daerah yang dikuasai Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan mengenai bahan cetakan.

3.2.1. Koloniale Besluit 1856

Peraturan ini mewajibkan siapa saja yang akan menerbitkan dokumen harus menyerahkan dokumen yang akan diterbitkan untuk diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat pemerintahan. Praktik ini merupakan sensor yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Contoh dokumen yang lolos sensor dikirim ke Bibliotheek Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

3.2.2. Koloniale Besluit tahun 1913

Pada Staatsblad nomor 7981 tahun 1913 tentang *Toezending van drukwerken aan het Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen* semua kantor pemerintah diminta mengirimkan sebuah eksemplar terbitannya tanpa biaya (*een exemplaar kosteloos*) kepada direksi Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Peraturan tersebut menggantikan Staatsblad 1856 nomor 74 serta Staatsblad 1906 nomor 270.

3.4. Zaman Jepang

Ketika Jepang menduduki Indonesia, semua kegiatan kantor, lembaga dan organisasi Belanda dihapus. Semua nama kantor diubah kedalam bahasa Jepang. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ditutup sehingga dengan sendirinya tidak ada lagi pengiriman karya cetak berdasarkan kewajiban yang ditentukan undang-undang. Hal ini menyebabkan tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai penerbitan semasa pendudukan Jepang. Karya yang mencakup terbitan masa itu adalah karangan John Echols berjudul *Preliminary checklist of Indonesian imprints during the Japanese period: March 1942 – August 1945*⁹. Mastini menyatakan bahwa selama masa pendudukan Jepang, perpustakaan (Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang nonaktif) masih menerima penerbitan pemerintah pendudukan Jepang termasuk terbitan *Kan Po*¹⁰ dan beberapa terbitan lain. Kelak koleksi ini diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai *Katalog Terbitan Indonesia Selama Pendudukan Jepang 1942-1945*¹¹.

⁸ Kecuali Bengkulu yang masih dikuasai Inggris. Tahun 1819 Bengkulu ditukar dengan Singapura berdasarkan Traktat London 1819

⁹ Cornell University Press, 1963 setebal 56 halaman

¹⁰ Mastini Hardjo Prakoso, "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia," *Madjalah HPCI*, 4 (1) 1973:8

¹¹ *Perpustakaan nasional*, 1983 setebal 101 halaman.

3.5. Zaman Republik Indonesia.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, terutama yang berkaitan dengan fungsi deposit bahan perpustakaan. Perkembangan sejarah, kondisi politik dan ekonomi tidak memungkinkan berbagai perusahaan Belanda untuk menyumbang secara tetap kepada Bataviaasch Genootschap.

Pada sebuah rapat diputuskan bahwa nama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman sehingga diputuskan untuk diganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1952. Lembaga ini mengalami kesulitan keuangan karena hidupnya bergantung pada iuran para anggota (pada tahun 1957 berjumlah 287), sumbangan para dermawan, hasil penjualan karcis museum dan penjualan terbitan. Pemasukan dari berbagai sumber tersebut tidak mencukupi kebutuhan lembaga sehingga setengah dari anggaran harus ditutup dengan subsidi pemerintah.¹² Selanjutnya harta kekayaan Lembaga Kebudayaan Indonesia sepenuhnya diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1962. Dengan penyerahan tersebut, maka tamatlah riwayat Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Penyerahan harta benda kepada pemerintah Indonesia mencakup juga koleksi perpustakaan yang menjadi cikal bakal pembentukan Perpustakaan Museum Pusat. Walaupun Batavia Genootschap ditutup pada tahun 1962, namun fungsi pengelolaan kewajiban menyerahkan terbitan kepada Bataviaasch Genootschap sudah tidak berjalan sejak 1942 sampai 1952.

Tatkala Bataviaasch Genootschap berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia, ketentuan tahun 1913 juga tidak berlaku lagi, sehingga dari segi pengawasan bibliografi terdapat masa kosong antara 1942-1952. Penerbitan masa itu, terutama antara 1945 sampai 1952, dicakup dalam karya Ockeloen yang berupa *Catalogus buku2 jang diterbitkan di Indonesia*¹³. Ockeloen juga menerbitkan terbitan serupa yang mencakup periode 1952-1953. Penyusunan kedua terbitan itu tidak didukung oleh undang-undang deposit.

3.3.1. Kantor Bibliografi Nasional

Kantor Bibliografi Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan no. 46860/KAB/11 Desember 1952¹⁴, di kepalai oleh G. Ockeloen¹⁵. Tugas lembaga ini ialah "menyelenggarakan menurut sistem tertentu, pendaftaran segala kitab-kitab, madjalah-madjalah dan laporan-laporan jang dicetak dan diterbitkan di Indonesia, ketjuali jang bersifat rahasia¹⁶."

Fungsi depositori sebuah perpustakaan nasional baru dijalankan lagi pada tahun 1952 dengan pembentukan Kantor Bibliografi Nasional, yang ditugaskan "mendaftar segala buku, madjalah dan laporan" yang dicetak dan diterbitkan di Indonesia menurut sistem tertentu¹⁷. Namun sebenarnya fungsi tersebut bukanlah sekuat sebuah undang-undang depositori karena hanya merupakan keputusan menteri. Karena itu usaha Kantor Bibliografi Nasional mengalami hambatan bahkan

¹² Moh. Amir Sutaraga, *Museum Djakarta*. Makalah, diketik

¹³ Jakarta: Kolff, 1950 terdiri atas 2 jilid. Jilid 1 memuat daftar buku berbahasa Belanda yang terbit di Indonesia antara 1945-1949, jilid 2 daftar buku berbahasa Melayu terbitan 1937-1941

¹⁴ Periksa Indonesia. [Undang-Undang, Peraturan dsb] *Himpunan lengkap peraturan perundang-undangan tentang perpustakaan & perbukuan di Indonesia*; disusun oleh Djadjuliyanto dkk. (Jakarta: Muara Agung, 1990?) p. 17

¹⁵ Mengenai G. Ockeloen lihat Obituary, Ockeloen, *Indonesia*, (2) Oct 1966:157-167

¹⁶ Indonesia. {Undang-Undang, Peraturan dsb} Himpunan ..., p. 17

¹⁷ Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan no. 46860/KAB/11 Desember 1952

juga tidak dapat berbuat banyak menerima terbitan dari lingkungan Kementerian PPK. Tidak salah bila Luwarsih¹⁸ mengatakan sejak semula Kantor Bibliografi Nasional tidak pernah mampu melakukan tugasnya. Bibliografi yang diterbitkan oleh Kantor Bibliografi Nasional jauh dari lengkap, bibliografi bermutu rendah, lambat terbit sehingga kehilangan fungsinya¹⁹.

3.3.2. Lembaga Perpustakaan (1967-1975)

Kantor Bibliografi Nasional kemudian digabung dengan Biro Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Lembaga Perpustakaan. Sebutan Kantor Bibliografi Nasional kemudian diubah menjadi Urusan Bibliografi Nasional dan Katalogus Induk Lembaga Perpustakaan²⁰. Tugas yang diemban Urusan Bibliografi Nasional, Lembaga Perpustakaan tetap sama seperti semula yaitu mendaftar semua penerbitan Indonesia dan menyusun bibliografi nasional Indonesia.

3.3.2. Pusat Pembinaan Perpustakaan (1975-1990)

Ketika Lembaga Perpustakaan berubah menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan, maka Bagian Bibliografi Nasional berubah menjadi Bidang Bibliografi dan Deposit, Perpustakaan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang tersebut mempunyai fungsi:

- (a) menyelenggarakan perpustakaan deposit, pencatatan dan pengumpulan bahan bibliografi nasional;
- (b) mencatat dan mengumpulkan bahan katalogus induk dan bibliografi umum;
- (c) mengumpulkan data termasuk statistik tentang perbukuan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri;
- (d) Menyelenggarakan pelayanan bibliografi kepada perpustakaan-perpustakaan baik yang berada dilingkungan Departemen [Pendidikan dan Kebudayaan] maupun kepada instansi yang berada di luar lingkungan Departemen dan kepada umum.

Bidang Bibliografi dan Deposit Pusat Pembinaan Perpustakaan menerbitkan *Bibliografi Nasional Indonesia*. Usaha ini didukung oleh dana pembelian yang masuk anggaran Pusat Pembinaan Perpustakaan namun tidak ditunjang oleh semacam undang-undang deposit. Yang ada hanyalah Surat Edaran Sekretariat Negara yang meminta lembaga negara dan pemerintah daerah tingkat I provinsi untuk mengirimkan contoh terbitannya kepada Sekretariat Negara. Selanjutnya Sekretariat Negara meneruskannya ke Pusat Pembinaan Perpustakaan.

3.3.4. Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1980-1989)

Selama masa ini Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyelenggarakan fungsi penyimpanan sebagaimana lazimnya karena fungsi tersebut dilakukan oleh Pusat Pembinaan. Maka walaupun namanya Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perpustakaan tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah perpustakaan nasional yang sesungguhnya karena tidak menjalankan fungsi utama. Fungsi penyimpanan terbitan nasional justru dilakukan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan.

¹⁸ Luwarsih Pringgoadisurjo "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia: suatu tanggapan," *Madjalah HPCI*, 4 (2) 1973:53-4

¹⁹ Luwarsih, *Pentingnya...*, p.54

²⁰ Indonesia [Undang-Undang, peraturan, dsb] *Himpunan...*, p 117

Bila memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980, maka tugas Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ialah:

- (a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendayagunaan bahan pustaka yang ditervitkan di Indonesia sebagai koleksi deposit nasional;
- (b) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, serta mendayagunakan bahan pustaka dengan mengutamakan bidang ilmu sosial dan kemanusiaan dan terbitan asing tentang Indonesia;
- (c) melaksanakan penyusunan dan penerbitan bibliografi nasional;
- (d) melaksanakan tugas sebagai pusat kerjasama antarperpustakaan di dalam negeri, maupun dengan luar negeri;
- (e) memberikan jasa referensi studi, jasa bibliografi dan informasi ilmiah.

Dalam tugas Pusat pembinaan Perpustakaan tercakup tugas "...menyelenggarakan bibliografi nasional, bibliografi khusus serta menyelenggarakan katalogus induk nasional serta bertindak sebagai perpustakaan deposit...²¹." Bila menyimak tugas Pusat pembinaan Perpustakaan serta tugas Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka di antara kedua lembaga terdapat saling tindih tugas. Kesalingtindihan itu menyangkut penyusunan bibliografi nasional. Ketumpangtindihan itu juga memiliki persamaan yaitu kedua tugas tidak didukung dengan produk perundang-undangan semacam undang-undang deposit. Maka dari tumpang tindih tugas itu secara tidak langsung terjadi persaingan antara Pusat Pembinaan Perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 1980 (ditandai dengan pembentukan Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) sampai dengan keluarnya Keputusan Presiden tahun 1989, yang menyatukan Pusat Pembinaan Perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Periode 1942 sampai dengan 1990 ditandai dengan tiadanya fungsi utama perpustakaan nasional berupa pengumpulan terbitan Indonesia yang ditunjang oleh produk perundang-undangan. Selama masa pendudukan Jepang tidak ada kewajiban untuk mengirimkan terbitan ke Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Masa itu ditandai dengan pengerahan segala upaya untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Sungguhpun demikian beberapa terbitan mencatat publikasi selama masa pendudukan Jepang²². Periode itu ditandai upaya pencatatan bibliografi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pendirian kantor cabang perpustakaan nasional AS di Indonesia. Tercatat Library of Congress yang membuka kantor cabangnya di Jakarta pada tahun 1963²³, dengan hasil Library of Congress memiliki koleksi penerbitan Indonesia sesudah Perang Dunia II. Kemudian menyusul Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) yang memusatkan diri pada ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, kemudian National Library of

²¹ Indonesia. {Undang-Undang, Peraturan, dsb} Himpunan... (Jakarta: Muara Agung, 1990)p 140. Penjelasan tersebut merupakan bagian dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 079/0/tahun 1975 tentang susunan dan tatakerja departemen.

²² John Echols, *Preliminary checklist of Indonesian imprints during the Japanese period: March 1942-August 1945*, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1963) 56 halaman. Terbitan I Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Katalog terbitan Indoensia selama masa pendudukan Jepang 1942-1945* (Jakarta: 1983) 101 halaman. Ockeloen juga tidak mencatat terbitan semasa pendudukan Jepang. Periksa Sulistyio-Basuki, *Periodisasi perpustakaan Indonesia* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1993), p.166-8

²³ Mastini Hardjo Prakoso, "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia," *Madjalah HPCI*, 4 (1) 1973: 4

Australia. Selama masa itu tercatat juga kegiatan Perpustakaan Negara (Malaysia) dan Institut of Southeast Asian Studies (ISEAS) yang menunjuk agennya untuk membeli terbitan Indonesia khusus dalam ilmu pengetahuan sosial.

3.3.4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (1989-)

Pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden tahun 1989 menandai era baru kepustakawanan nasional di Indonesia. Lembaga baru itu menyatukan dua lembaga yang telah ada sebelumnya, yaitu Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen P&K dengan Perpustakaan Nasional Dep P&K. Pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disusul dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan karya Cetak dan Rekam.

Bila melihat fungsi utama sebuah perpustakaan nasional, maka keperpustakaan nasional di Indonesia berlangsung antara tahun 1913 sampai 1942, kemudian 1990 sampai sekarang. Periode 1942 sampai 1952 saat dibentuknya Kantor Bibliografi Nasional ditandai dengan masa tiadanya lembaga yang bertugas mencatat terbitan di Indonesia. Periode 1952, bersamaan dengan pembentukan Kantor Bibliografi Nasional sampai keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dicirikan dengan upaya pencatatan terbitan Indonesia namun tanpa produk perundang-undangan yang mendukungnya. Memang pada periode itu keluar bermacam-macam produk perundang-undangan semacam Surat Edaran, Surat Keputusan tingkat Menteri dan kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang ditujukan kepada penerbit agar mereka mengirim terbitannya ke perpustakaan yang ditunjuk, namun semuanya tidak mempunyai kekuatan seperti sebuah undang-undang.

Fungsi penyimpanan dilakukan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pasca 1942 berupa penunjukannya sebagai perpustakaan deposit bagi terbitan PBB. Fungsi ini masih dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI sampai sekarang. Beberapa perpustakaan perguruan tinggi juga ditunjuk menjadi penerima terbitan PBB untuk bidang tertentu, misalnya Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia serta Perpustakaan Universitas Katolik Atma Jaya untuk bidang ekonomi dan sosial.

3.6. Literatur kelabu

Fungsi penyimpanan literatur kelabu²⁴ tidak dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Fungsi itu dilakukan oleh masing-masing lembaga. Sebagai contoh perpustakaan universitas wajib menyimpan karya akhir mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi), baik dalam bentuk kopi makas (*hard copy*) maupun elektronik. Terbitan serupa juga dilakukan oleh perpustakaan lembaga lain. Karena itu perpustakaan nasional akan bekerja sama dengan perpustakaan lembaga lain menyangkut terbitan sebuah negara, khususnya terbitan dalam bentuk literatur kelabu. Karena itu benar ucapan pepatah "no library is an island" yang bermakna perpustakaan (nasional) perlu bekerja sama dengan perpustakaan lain dalam rangka pengawasan bibliografis.

²⁴ Publikasi yang tidak dapat diperoleh melalui saluran perdagangan buku yang lazim. Periksa "Grey literature" pada *International Encyclopedia of Information and Library Science* 2nd ed. London: Routledge, 2003 juga definisi yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi

BAB 4 PENDEKATAN BERDASARKAN KONSEP

4.1. Pendahuluan

Para bapak bangsa yang memelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia pada awal abad 20 umumnya lulusan sekolah tinggi, sesuatu yang sangat tinggi nilainya pada masa itu. Mereka dengan fasih mengutip berbagai karya besar dalam berbagai bahasa sebagaimana nampak pada pidato-pidato Bung Karno dan Bung Hatta. Sebagai lulusan HBS atau AMS yang menekankan penguasaan bahasa dan membaca sehingga bacaan Barat dalam berbagai buku dengan mudah dikuasainya. Tidaklah keliru bila Taufik Ismail mengatakan bahwa anak-anak SMA lulusan tahun 1950an membaca jauh lebih banyak daripada anak-anak SMA lulusan dua puluh tahun kemudian¹.

Dalam Konferensi Medja Bundar (KMB) Bung Hatta masih memperjuangkan adanya sebuah perpustakaan yang berbobot di Indonesia. Hasilnya ialah gedung Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking) di Jln. Merdeka Selatan 11 Jakarta². Gedung tersebut dihibahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1952 dan namanya diubah menjadi Perpustakaan Sedjarah dan Politik (S.P.S.). Perpustakaan S.P.S. merupakan salah satu komponen perpustakaan nasional yang kelak dibentuk pada tahun 1980. Namun demikian belum jelas kapan tepatnya gagasan tentang pembentukan perpustakaan nasional mulai diluncurkan.

4.2. Kajian bibliometrika

Bibliometrika adalah kajian penerbitan dengan menggunakan metode matematika dan statistika. Metode ini udah banyak digunakan di Indonesia terutama dalam bentuk karya akhir mahasiswa dan hasil penelitian.

Dalam bibliometrika dikenal analisis sitiran, yaitu kajian atas daftar kepustakaan atau referensi atau bibliografi. Analisis sitiran dilakukan terhadap semua tulisan mengenai Perpustakaan Nasional Indonesia. Setiap karya kemudian diperiksa bibliografinya. Berdasarkan bibliografi tersebut dibuat catatan yang digunakan untuk menelusur karya-karya siapa saja yang pernah disitir. Sebuah sitiran akan merujuk ke karya lain yang telah terbit sebelumnya.

Kajian ini dilakukan terhadap tulisan tentang perpustakaan nasional karya Mastini³, Tairas⁴, Rachmat Natadjudena⁵, Zulfikar⁶, Poon⁷. Hasil kajian menunjukkan bahwa semua karya tulis tersebut merujuk ke laporan Dunningham.

¹ Taufik Ismail,.....

² Gedung ini sudah ada sejak tahun 1916. Periksa Vereeniging van de .. Pada halaman depan terpampang foto bangunan yang kini menjadi bagian Perpustakaan Nasional RI.

³ Mastini Hardjo Prakoso, "The development of library in Indonesia," *Indonesian Quarterly*, 3 (2) 1975: 74-83; *The need of a national library for Indonesia* (Makalah untuk University of Hawaii) memuat rujukan ke laporan Dunningham. Tulisan lain "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia," *Madjalah HPCI*, 4 (1) 1973: 2-14 serta *Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan Museum Pusat, 1973) tidak memuat bibliografi.

⁴ JNB Tairas, *Towards a national library for Indonesia* (Wellington, Library School, New Zealand National Library Service, 1960)

⁵ Rachmat Natadjudena, "An Indonesian national library," *Australian Academic Research Libraries*, 9, 1977: 127-30,

⁶ Zulfikar Zen, "Perpustakaan Nasional Indonesia: perjalanan yang panjang," *Majalah Ilmu Perpustakaan & Informatika*, 9 (1) 1984: 17-28

⁷ Paul M.T. :Poon, "A proposed national library system in Indonesia," *Australian Academic Research Libraries*, 6 (11) 1975: 20-30

Tulisan lain dari Mastini⁸ maupun Luwarsih⁹ tidak menyebut karya Dunningham; kedua karya itu lebih mengarah ke konsep Perpustakaan Nasional Indonesia. (Lampiran 1)

Laporan berbagai konsultan asing seperti Applebamum, Kinght Lee, Massil, Solyom, Thomson, Townsen dan Ward tidak langsung menyebut laporan Dunningham karena laporan konsultasi dibuat sesudah tahun 1980.

4.3. AGW Dunningham

Dunningham adalah seorang konsultan dari New Zealand yang atas biaya UNESCO melakukan kunjungan ke berbagai perpustakaan di Indonesia. Dalam kunjungannya tersebut Dunningham ditemani oleh Mr Patah, kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta (?). Dunningham menghasilkan sebuah laporan berjudul *Report in a survey and recommendation dor the establishment of a national library service in Indonesia*^{10[10]} yang dianggap klasik dalam literatur kepustakwanan Indonesia karena untuk pertama kalinya diusulkan pembentukan sistem nasional perpustakaan.

Dalam laporannya, Dunningham mengatakan perlunya pembentukan sistem nasional perpustakaan (*National Library System*)¹¹. Sebagian orang berpendapat bahwa gagasan tersebut tidak sama dengan gagasan tentang sebuah perpustakaan nasional. Akan tetapi, bila melihat konsepnya, maka apa yang dilaporkan itu sebenarnya adalah gagasan perpustakaan nasional. Gagasan itu juga tidak terlepas dari lingkungannya, New Zealand, tempat dikenalnya *national library service*. Pendapat tersebut juga didukung penelitian bibliometrik atas semua karya tentang perpustakaan nasional, yang keseluruhan hasilnya merujuk ke laporan Dunningham. Tairas, dalam tulisannya tatkala bersekolah di New Zealand, juga mendasarkan karyanya atas dasar pikiran Dunningham. Dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan layanan perpustakaan yang memuaskan serta mempersiapkan pembangunan layanan nasional perpustakaan adalah melalui sebuah perpustakaan nasional^{12[12]}.

4.4. Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia I

Istilah perpustakaan nasional muncul sekitar tahun 1954 bersamaan dengan Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia I. Konferensi tersebut diselenggarakan di Jakarta pada tgl 25 s.d. 27 Maret, 1954 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan. Dalam pidato pembukaannya Mr Muhammad Yamin mengemukakan kemungkinan pendirian Dewan Perpustakaan Nasional yang bertugas melakukan koordinasi, mengawasi dan memberikan nasehat dalam hal perpustakaan kepada Pemerintah¹³. Menteri PPK menyatakan pembentukan Dewan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga penasehat Hal itu diikuti oleh Keputusan Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia yang memutuskan untuk membentuk Panitia Dewan Perpustakaan Nasional yang

⁸ Mastini Hardjo Prakoso, "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia," *Madajalah HPCI*, 4 (1) 1973: 2-14

⁹ Luwarsih Pringgoadisurjo, "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia: suatu tanggapan," *Madjalah HPCVI*, 4 (2) 1973: 127-30

¹⁰ Paris: UNESCO, 1953

¹¹ A.G.W. Dunningham dan R. Patah, *Report on a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia*. Paris: UNESCO, 1953.

¹² Jenny Novita M.A., *Sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional R.I.; 1950-an – 1989* (Skripsi – Universitas Indonesia – 1989).p 55; J N B Tairas, *Toward a national library for Indonesia* (Wellington: School Library, National Library Service, 1966.

¹³ Muhammad Yamin. *Pidato Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan pada Konperensi*

bertugas mengusahakan terbentuknya Dewan Perpustakaan Nasional. Anggota Panitia Dewan Perpustakaan Nasional adalah:

1. Rustam Sutan Palindih
2. O.D.P. Sihombing
3. J. E. Tatengkeng
4. Sadarjoen Siswomartojo
5. A. Hamzah Nasution

Seusai konferensi, pemerintah membentuk Dewan Perpustakaan Nasional pada tahun 1955, berdasarkan Surat Keputusan nomor 17287/Kab tanggal 25 Maret 1955. Adapun susunan Dewan Perpustakaan Nasional ialah sebagai berikut:

Ketua : Rustam Sutan Palindih

Anggota : Drs O D P Sihombing

Soemarni Kartadiredja, MA (merangkap ketua bidang teknis)
Moeksan

Drs Ong Hian Oey (merangkap sekretaris)¹⁴

Tugas Dewan Perpustakaan Nasional ialah:

- (1) Memberikan informasi dan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan baik diminta oleh menteri ataupun atas inisiatif sendiri;
- (2) Memberikan saran dan informasi bagi perpustakaan pribadi atau pada tiap orang yang membutuhkan informasi tentang perpustakaan;
- (3) Menyelenggarakan pembangunan kerjasama dan koordinasi antarperpustakaan di Indonesia¹⁵.

Tujuan akhir Dewan Perpustakaan Nasional ialah mendirikan perpustakaan nasional¹⁶ Pada tahun 1956. Dewan Perpustakaan Nasional bersama Biro Perpustakaan Dep. PP&K menyusun Rantjangan Undang-Undang Pengumpulan Hasil Karya Tjetak Indonesia serta mengajukan usul kepada Menteri P.P&K tentang pembentukan perpustakaan nasional, namun tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah¹⁷. Hal itu menurut Tairas terjadi mungkin karena pemerintah belum siap melaksanakan pembangunan perpustakaan nasional¹⁸. Dewan Perpustakaan Nasional menerbitkan *Buletin Dewan Perpustakaan Nasional* sampai tiga nomor. Dewan Perpustakaan Nasional kemudian dibubarkan tahun 1959.

4.5. Tim Kerdja Pembentukan Perpustakaan Nasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1962 membentuk Tim Kerdja Persiapan Pendirian Perpustakaan Nasional. Sebenarnya nama resminya ialah Tim Persiapan Pembentukan Museum Nasional, Wisma Seni nasional dan Perpustakaan Nasional¹⁹. Adapun anggota Tim Kerdja Pembentukan Perpustakaan Nasional ialah sebagai berikut:

¹⁴ "Kolom brita," *Perpustakaan, ASrsip, Dokumentasi*, 11 (1) 1957:

¹⁵ J.N.B. Tairas, *Toward a national library for Indonesia (Wellington: School Library National Library Service, 1960*

¹⁶ Haryati Soebadio, *Perpustakaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1992),p. 4

¹⁷ Moh. Joesoef Tjoen dan S. Pardede, *Perpustakaan Indoensia dari zaman ke zaman* (Jakarta: Kantor Bibliografi Nasional,1966),p. 19

¹⁸ Jenny Novita M.A., *Sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional R.I.: 1950 an – 1989*. (Skripsi – Universitas Indonesia – 1998),p.25

¹⁹ *Perpustakaan Nasional: pertumbuhan, perkembangan dan langkah majunya* (Jakarta:Peprustakaan Nasional, 1991),p.7

Ketua merangkap anggota : Drs Soekmono²⁰
 Wakil ketua I/anggota : Henk Ngantung
 Wakil Ketua II/anggota : M. Joesoef Tjoen
 Sekretaris I/anggota : Drs. Moh. Amir Sutaraga
 Sekretaris II/anggota : Drs L. Mardiwasisa
 Anggota : Soedarisman
 : Soebagio
 : R.Ng. Sastrodiwongso
 : Mr Soerojo Warsid
 : Dra. Moliar Achmad
 : E. Mohammad Joenoes
 : Soemardjo
 : G. Kapitan
 : Soemarjo
 : Soediono

Tim Kerdja Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Jajasan Arsitektur Bandung membuat *lay-out* gedung perpustakaan dengan masukan dari ahli perpustakaan²¹ seperti M. Joesoef Tjoen, Gusti Mulia, JNB Tairas dan AGW Dunningham. Setelah menyelesaikan tugasnya, tim kerja tersebut menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, mendesak agar segera merealisasikan pembentukan Museum Nasional, Wisma Seni Nasional dan Perpustakaan Nasional. Usulan itu tidak pernah ditanggapi Menteri. Mungkin karena situasi politik yang melanda Indonesia serta situasi ekonomi pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. Tim Kerdja dibubarkan pada tahun 1965.

4.6. Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana (1961-1969)

Gagasan pembentukan sebuah perpustakaan nasional muncul dalam *Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana (1961-1969)* susunan Badan Perentaja dan Pembangunan Nasional seiring dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat no. I dan II tahun 1960. Proyek Pembangunan Perpustakaan Nasional diberi kode A44 serta merupakan 11 proyek dari 11 bidang kebudayaan. Gedung perpustakaan nasional direncanakan terdiri dari 11 lantai serta mampu menampung 4.000.000 buku²².

Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Dep. PD&K) membentuk tim kerja yang bertugas mempersiapkan tiga proyek sekaligus yaitu proyek pembangunan Museum Nasional, Wisma Seni nasional dan Perpustakaan nasional. Tanggal 19 November 1962, Dep. PD&K membentuk Team Kerdja Persiapan Pendirian Museum nasional, Wisma Kesenian dan Perpustakaan Nasional. Tanggal 12 Mei 1964, Menteri PD&K mengubah nama tim menjadi Team Kerdja Persiapan Pendirian Museum Nasional, Wisma Seni Nasional dan Perpustakaan Nasional. Salah satu hasil team Kerja ialah *layout* gedung perpustakaan nasional.

Panitia Kerdja Harian dari Team Kerdja Persiapan Pendirian Museum Nasional, Wisma Seni Nasional dan Perpustakaan Nasional menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Prof. Prijono), mengusulkan agar perpustakaan nasional segera

²⁰ Menggantikan Indrosoegondho sebagai ketua, Periksa *Perpustakaan Nasional: pertumbuhan, perkembangan dan langkah majunya*

²¹ Istilah yang lazim digunakan pada masa tersebut. Kini menjadi pustakawan

²² Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta berentjana delapan tahun 1961-1969. (Jakarta: Dewan Perantajng Nasional, 1961), jilid V.

dibentuk secara resmi. Tidak perlu menunggu sampai gedung yang direncanakan sebagai Gedung Perpustakaan Nasional tersedia.

Usaha membentuk perpustakaan nasional akibat situasi politik dan ekonomi mulai pertengahan dasarwarsa 1960 mengalami hambatan akibat situasi politik dan ekonomi Indonesia. Situasi politik menjadi tidak stabil akibat peristiwa Gerakan 30 September yang dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia²³ (G30S PKI). Masa kepresidenan Soekarno yang lazim disebut Orde Lama digantikan oleh Orde Baru. Kegentingan politik memicu krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang ditandai, antara lain, dengan inflasi yang mencapai 650%. Inflasi tersebut sampai saat itu dianggap sebagai inflasi tertinggi sesudah Perang Dunia. Pada tahun 1977 ditunjuklah seorang konsultan Indonesia, Prof. Selo Soemardjan yang memberikan laporan pada tahun itu juga²⁴.

4.7. Biro Perpustakaan

Biro Perpustakaan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mendapat tugas baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri PD&K no. 92/ tahun 1964. Dalam surat tersebut dirinci tugas Biro Perpustakaan sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan negara di tiap ibukota Daerah Tingkat I
- (2) Membimbing dan mengawasi semua perpustakaan dalam lingkungan departemen dan mengadakan kerjasama dengan perpustakaan di luar departemen, di daerah dan badan-badan/organisasi/ instansi luar negeri dalam masalah perpustakaan
- (3) Mengusahakan tenaga perpustakaan yang terdidik untuk keperluan perpustakaan di lingkungan departemen
- (4) *Ikut serta mengadakan persiapan pendirian perpustakaan nasional [cetak miring dari penulis]*
- (5) Menyusun bibliografi nasional
- (6) Menyusun katalogus induk dan penerbitan
- (7) Mengadakan standardisasi perpustakaan
- (8) Bertindak sebagai perpustakaan deposit
- (9) Menyelenggarakan pengawasan, penelitian dan memberikan persetujuan pemasukan buku, majalah dan terbitan luar negeri lainnya dari luar negeri, serta ikut mengurus penetapan pembagian subsidi impornya
- (10) Menyelenggarakan urusan arsip, ekspedisi, keuangan, kepegawaian dan lain-lainnya di lingkungan biro²⁵.

Dalam rangka pelaksanaan tugas nomor 4, maka Biro Perpustakaan bersama-sama Kepala Perpustakaan Sedjarah Politik dan Sosial (Perpustakaan SPS) mengusulkan pendirian perpustakaan nasional pada tgl 11 Oktober 1966 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan²⁶. Usulan tersebut mendapat tanggapan Menteri yang Pendidikan dan Kebudayaan yang menugaskan kepada dua lembaga untuk membuat surat keputusan pembentukan Perpustakaan Nasional. Rancangan keputusan diajukan ke Menteri pada tanggal 22 Oktober 1966. Dalam rancangan surat keputusan, direncanakan bahwa pembentukan Perpustakaan Nasional akan

²³ Mengenai Peristiwa Gerakan 30 September ini sampai saat ini terbit banyak buku, sebahagian isinya bertentangan.

²⁴ Selo Soemardjan, *Laporan dan rekomendasi tentang sistem perpustakaan nasional perpustakaan dan perpustakaan nasional Indonesia*. Jakarta: 1977.

²⁵ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *Memorandum Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: 1991), p.6-7

²⁶ Moh. Joesoef Tjoen dan S. Pardede, *Perpustakaan...*, p.39

diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1966, bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda. Namun rancangan surat keputusan tersebut tdiak pernah direalisasikan. Dalam sebuah wawancara²⁷, Hernandono²⁸ menyatakan bahwa pembangunan Perpustakaan Nasional ditangguhkan karena Proyek Perpustakaan Nasional bukan masuk prioritas pembangunan nasional. Prioritas pemerintah pada sat itu adalah memulihkan pertahanan dan keamanan negara.

4.8. Laporan Selo Soemardjan²⁹

Selo Soemardjan menyatakan perlunya perpustakaan nasional yang dibentuk dengan undang-undang³⁰. Dia juga mengatakan bahwa beberapa lembaga yang ada dianggap perlu untuk ditingkatkan menjadi perpustakaan pusat dalam bidangnya. Lembaga yang disebut ialah Pusat Dokumentasi dan Informasi Nasional (Lembagas Ilmu Pengetahuan Indonesia), Bibliotheca Bogoriensis (di bawah departemen Pertanian), Perpustakaan Pusat Kesehatan di bawah Departemen Kesehatan) serta Perpustakaan Museum Pusat, Perpustakaan Sedjarah Politik dan Sosial dan Kantor Bibliografi Nasional (dari departemen Pendidikan dan kebudayaan) digabung menjadi satu sebagai Pusat Bidang ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Juga dinyatakan agar pusat Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial yang saat itu masih berupa proyek digabungkan kedalam Perpustakaan Pusat bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan³¹. Usulan Selo Soemardjan masih mengacu pada keberadaan perpustakaan yang kuat pada subjek tertentu. Kelak usulan ini menjadi pertimbangan tatkala Daed Joesoef membentuk Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980³².

Hal yang berbeda dengan usulan lain, Selo Soemardjan mengusulkan semacam organ bernama Badan Nasional Perpustakaan membawahi Perpustakaan NasionalRI dan Perpustakaan Pusat Ilmu2 Sosial dan Kemanusiaan³³.

4.9. Lembaga Perpustakaan

Sebagai sebuah unit kerja, Biro Perpustakaan tidak dapat berbuat banyak karena secara administratif sebuah biro hanyalah sebuah badan yang berfungsi staf namun tidak punya fungsi operasional dan aparat di daerah³⁴. Sebagai contoh Biro Perpustakaan tidak berwenang membina perpustakaan negara, pada masa itu berjumlah 19 buah sehingga Perpustakaan Negara terlantar selama beberapa tahun³⁵. Maka pada tanggal 6 Desember 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 095, Biro Perpustakaan diubah menjadi Lembaga Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tugas dan wewenangnya ialah sebagai berikut:

(1) bertindak sebagai kantor pusat bagi 19 Perpustakaan Negara;

²⁷ Jenny Novita M.A. *Jejarah berdirinya Perpustakaan Nasional R.I.: 1950an – 1989* (Skripsi – Universitas Indonesia – 1998), p.63

²⁸ Kelak menjadi Kepala ke dua Perpustakaan Nasional RI

²⁹ Selo Soemardjan, *Laporan dan rekomendasi tentang system nasional perpustakaan dan perpustakaan nasional Indonesia* Jakarta: 1977

³⁰ Ibid...p65

³¹ Disebut Proyek Pusat Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, lazim dikenal sebagai PDIS. Setelah proyek usai, koleksi diserahkan ke PDIN

³² Dalam surat keputusan dinyatakan bahwa Perpustakaan Nasional departemen Pendidikan dan Kebudayaan bergerak dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan.

³³ Selo Soemardjan, *Laporand an rekomendasi tentang sistem nasional perpustakaan dan perpustakaan nasional Indonesia* (Jakarta: 1977), p.64-65

³⁴ Jenny Novita M.A. *Sejarah...*, p.63; Bandingkan juga dengan *Himpunan lengkap peraturan perundang-undnagan tentang perpustakaan dan perbukuan di Indonesia: 1951-1990* (Jakarta: Muara Agfung, 1991). Juga periksa *Memorandum Pusat Pembinaan Perpustakaan* (Jakarta: 1989), p7

³⁵ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *memorandum* (Jakarta: 1989), p 7

- (2) menyelenggarakan Perpustakaan Sedjarah Politik dan Sosial di Jakarta;
- (3) menyelenggarakan penyusunan bibliografi nasional serta katalogus induk
- (4) mengadakan pemikiran ke arah persiapan pembentukan Perpustakaan Nasional dan sistem perpustakaan yang meliputi seluruh negara dengan jalan memikirkan pengembangan status semua perpustakaan yang ada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (antara lain Perpustakaan Museum, Perpustakaan Sedjarah Politik dan Sosial, perpustakaan di fakultas, Perpustakaan Negara, Perpustakaan-perpustakaan masyarakat menjadi unsur Perpustakaan Nasional dan Sistem Perpustakaan Nasional^{36[36]}).

Butir keempat jelas menyatakan pemikiran pembentukan perpustakaan nasional. Lembaga Perpustakaan yang dibentuk tahun 1967 itu mengalami hambatan akibat situasi politik dan ekonomi yang menerpa Indonesia pada tahun 1960an sampai 1968. Pada masa itu pemerintah memusatkan pada stabilisasi politik dan ekonomi nasional. Lembaga Perpustakaan mulai menerima anggaran dalam Pembangunan Lima Tahun (PELITA) PERTAMA, 1968-1973. Selanjutnya Lembaga Perpustakaan diubah menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan pada tahun 1975.

4.10. Pusat Pembinaan Perpustakaan

Pusat Pembinaan Perpustakaan dibentuk tahun 1975 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini mempunyai berbagai fungsi, di antaranya, butir f³⁷, yaitu: "... mempersiapkan pembentukan Perpustakaan Nasional dan Sistem Perpustakaan yang meliputi seluruh negara..." Pusat Pembinaan Perpustakaan menyatakan telah memantapkan pola sistem nasional perpustakaan dari pusat sampai ke desa-desa³⁸. Juga dinyatakan bahwa perpustakaan nasional sebagai perpustakaan deposit nasional, pusat bibliografi nasional dan pusat kerjasama^{39[39]}. Menyangkut sistem nasional perpustakaan perlu dilengkapi dengan laboratorium perpustakaan serta sistem otomatisasi perpustakaan

4.11. Mastini Hardjo Prakoso

Mastini mulai mengusulkan pembentukan sistem perpustakaan nasional pada makalahnya untuk University of Hawaii dengan judul *The need of a National Library for Indonesia*. Gagasan tentang perpustakaan nasional dikemukakan dalam Kongres Pustakawan se Indonesia^{40[40]}. Mengenai status dan struktur organisasi perpustakaan nasional dikemukakan empat kemungkinan yaitu (1) sebagai lembaga non-departemental, (b) lembaga dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (3) Lembaga dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan (4) digabungkan sementara pengurusannya dengan Arsip Nasional. Gagasan tersebut juga dituangkan dalam sebuah karangan^{41[41]}, di dalamnya Mastini cenderung menyatukan gabungan dengan Arsip Nasional karena persamaan sifat dan fungsi kedua lembaga⁴². Karangan tersebut ditanggapi oleh Luwarsih⁴³. Luwarsih mendukung pendapat

³⁶ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 095/1967/6 Desember 1967

³⁷ Indonesia. Epartemen Pendidikan dan Kebudayaan *Surat keputusan Menteri... no 079/0/1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen... bab kesembilan Pusat Pembinaan Perpustakaan* Lihat juga karya Djadjuliyanto, *Himpunan lengkap...* p 139-141

³⁸ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *memorandum* ...p 11

³⁹ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *Memorandum* ...p 29-30

⁴⁰ Kongres ini membentuk Ikatan Pustakawan Indonesia. Makalahnya berjudul "Perlu kah Indonesiamemiliki perpustakaan nasional?"

⁴¹ Mastini Hardjo Prakoso, "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia," *Madjalah HPCI*, 4 (1) 1973: 3-14

⁴² Ibid, pada abstraknya

⁴³ Luwarsih Pringgoadisurjo, "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia: suatu tanggapan," *Madjalah HPCI*, 4 (2) 1973: 53--8

penggabungan Perpustakaan Nasional dengan Asrip Nasional berdasarkan status, fungsi dan soal penghematan. Namun demikian, Luwarsih juga menulis dilihat dari segi koleksi dan status administratif menyokong penggabungan Perpustakaan Museum, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial serta Kantor Bibliografi Nasional⁴⁴.

4.12. Rachmad Natadjumena

Dalam karangannya Rachmat mengusulkan pembentukan perpustakaan nasional⁴⁵ tidak jauh dari gagasan yang dikemukakan Mastini.

4.13. Konsultan asing

Selain laporannya yang dibuat pada tahun 1953, dia juga membuat laporan laporan konsultasi pada tahun 1964⁴⁶ dan 1969⁴⁷ yang melihat bahwa Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional⁴⁸ secara efektif telah menampung koleksi nasional khusus bidang sains dan teknologi sehingga dapat merupakan basis kerja sama dalam sistem nasional perpustakaan. Dia juga meninggung perlunya pembentukan Dewan Penyantun Nasional yang mengarahkan dan mengawasi perpustakaan nasional yang akan dibentuk. Bryan⁴⁹ menyebutkan empat pusat sebagai hasil keputusan Workshop Sistem Jaringan⁵⁰ berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dapat menyelenggarakan aktivitas program nasional di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Menyangkut pusat keempat yaitu perpustakaan yang bersedia berfungsi sebagai Pusat bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sampai tahun 1973 belum juga ditunjuk. Luwarsih menulis, dalam seminar yang mungkin diselenggarakan oleh LIPI mungkin juga oleh Perpustakaan Museum⁵¹ Philip Ward⁵², pengusulan sistem nasional perpustakaan yang terdiri dari:

1. Panitia Nasional Perpustakaan
2. Perpustakaan Nasional untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan
3. Perpustakaan Nasional untuk Teknologi dan Pengetahuan Alam
4. Perpustakaan Nasional untuk Kesehatan dan Kedokteran
5. Perpustakaan Nasional untuk Biologi dan Pertanian
6. Panitia Perpustakaan Umum
7. Direktorat Perpustakaan Umum
8. Direktorat Perpustakaan Sekolah
9. Panitia Perpustakaan Universitas
10. Direktorat Perpustakaan Universitas⁵³.

Nampaknya Philip Ward membaca, melihat dan mengunjungi perpustakaan pusat yang ditunjuk sebagai koordinator dalam bidang ilmu yang sesuai keputusan Workshop 1971. karena itu dia mengusulkan pembentukan perpustakaan nasional untuk empat bidang sesuai dengan usulan Workshop 1971.

⁴⁴ Ibid, p. 58

⁴⁵ Natadjumena, Rachmad. "An Indonesian national library," *Australian Academic Research Libraries*, 9, 1977: 127-30

⁴⁶ A.G.W. Dunningham, *Indonesia: library development in Indonesia*. Paris: Unesco, 1964.

⁴⁷ A.G. W. Dunningham, *Indonesia: library development*. Paris: Unesco, 1969

⁴⁸ Kini berubah menjadi Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

⁴⁹ Harrison Bryan, *Report on the development of national documentation/information services in Indonesia*. Jakarta: 1972

⁵⁰ Workshop Sistem Jaringan, *Laporan...* 1971.

⁵¹ Luwarsih Pringgoadisarjo, *Pentingnya...*, p. 54. Pada tahun 1977 s.d. 1980 kegiatan itu dilakukan oleh Proyek Pengembangan Jaringan Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, lebih dikenal sebagai PDIS.

⁵² Philip Ward, *Indonesia: development of a national library services*. Paris: UNESCO, 1975

⁵³ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *Memorandum...*, p.147

Dari sekian banyak penulis mengenai perpustakaan nasional, maka yang paling konsisten dalam karyanya adalah Mastini Hardjo Prakoso. Ia selalu mengemukakan pentingnya sebuah perpustakaan nasional bagi Indonesia⁵⁴. Kedekatannya dengan Ibu Negara (baca: Tien Soeharto) memungkinkan sebuah yayasan membangun gedung untuk sebuah perpustakaan nasional yang diresmikan pada tahun 1989. Bila dilihat rentang waktu, maka gagasan sebuah perpustakaan nasional yang dikemukakan oleh Dunningham memerlukan waktu lebih dari 45 tahun sampai terwujudnya sebuah perpustakaan nasional di Indonesia.

⁵⁴[⁵⁴] Periksa Mastini Hardjoprakoso, *Bunga rampai kepustakawanan*: Dikumpulkan oleh Wartini Santoso. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2005.

BAB 5

PENDEKATAN BERDASARKAN KELEMBAGAAN

5.1. Pendahuluan

Mengacu pada pertemuan Conference of Directors of National Libraries (CDNL) di Bangkok tahun 1999, didefinisikan perpustakaan nasional sebagai berikut: "Sebuah lembaga, terutama didanai (langsung atau tidak langsung) oleh Negara, bertanggung jawab secara komprehensif atas pengumpulan, pencatatan secara bibliografis, pelestarian dan menyediakan warisan documenter (terutama materi semua jenis yang diterbitkan) yang berasal dari atau berkaitan dengan sebuah negara; dan dapat juga bertanggung jawab atas upaya melaksanakan fungsi perpustakaan di negara yang bersangkutan secara efektif dan efisien melalui berbagai tugas seperti pengelolaan koleksi yang signifikan untuk negara, penyediaan infrastruktur, koordinasi atas aktivitas sistem perpustakaan dan informasi di negara yang bersangkutan, hubungan dengan dunia internasional atas melaksanakan kepemimpinan. Biasanya tanggung jawab ini secara formal diakui, lazimnya melalui undang-undang. Untuk keperluan ini maka sebuah negara didefinisikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat¹".

Lembaga yang dapat disebut sebagai perpustakaan nasional terdapat juga pada entitas nasional non-independen seperti perpustakaan nasional yang terdapat di Catalonia, Quebec dan Wales. Dalam bab ini definisi di atas pada lembaga di Indonesia yang menggunakan sebutan perpustakaan nasional.

5.2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989. Pada pasal 19 dinyatakan bahwa Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpustakaan Wilayah di Propinsi merupakan satuan organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas perpustakaan nasional. Bila membaca pasal 19 maka dapat menafsirkan bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan gabungan ketiga lembaga tersebut.

Dengan melihat gabungan ketiga lembaga tersebut maka sejarah Perpustakaan Nasional RI dapat dirunut berdasarkan pendekatan kelembagaan.

5.3. Pusat Pembinaan Perpustakaan

Pusat Pembinaan Perpustakaan merupakan kelanjutan dari Lembaga Perpustakaan sedangkan Lembaga Perpustakaan merupakan kelanjutan dari Biro Perpustakaan. Adapun Biro Perpustakaan mulai ada sejak tahun 1951 namun mulai aktif tahun 1954 di bawah Mr Lie Sek Hiang² dengan tugas mengurus penyelenggaraan (a) perpustakaan guna kepentingan pemerintah, (b) perpustakaan untuk pengumpulan semua hasil terbitan seluruh Indonesia dan (c) perpustakaan yang bersifat ilmu pengetahuan [sic].

Pusat Pembinaan Perpustakaan dibentuk pada tahun 1975 sebagai pengganti Lembaga Perpustakaan³. Pusat Pembinaan Perpustakaan terdiri atas 4 bagian yaitu bagian perpustakaan umum, bibliografi nasional, perpustakaan sekolah dan departemen dan bagian khusus. Bagian bibliografi nasional dari Pusat Pembinaan

¹ *International Encyclopedia of Information and Library Science* Ed. By John Feather and Paul Sturges. 2nd ed (London: Routledge, 2003).p. 445

² Kelak pindah ke Amerika Serikat

³ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *Memorandum* (Jakarta: 1989), p.9

Perpustakaan merupakan kelanjutan dari Kantor Bibliografi Nasional yang dibentuk pada tahun 1952 di Bandung⁴. Adapun kepala pertama Kantor Bibliografi Nasional adalah O.G. Ockeloen, penyusun berbagai bibliografi terbitan Indonesia.

Perpustakaan wilayah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perpustakaan Wilayah DKI merupakan perpustakaan wilayah tipe A karena memiliki koleksi 20.000 bahan pustaka atau lebih⁵. Akibat perubahan ini maka perpustakaan wilayah yang lain berada di bawah Pusat pembinaan Perpustakaan. Sayangnya menyisahkan integrasi perpustakaan wilayah ke Perpustakaan Nasional Dep P & K karena tidak lagi melayani langsung keperluan pemakai di Jakarta. Sebaliknya pendapat yang menyatakan bahwa tumpang tindih layanan kepada pemakai di Jakarta (Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Museum Nasional dan Perpustakaan Wilayah dep. P &) perlu digabungkan agar dapat memberikan layanan maksimal⁶.

Perpustakaan Wilayah itu sendiri merupakan metamorfosa Perpustakaan Negara⁷. Dalam keputusan Menteri PP&K 1956, Perpustakaan Negara tidak ditugaskan mengumpulkan semua terbitan. Nampaknya tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Bibliografi Nasional.

Perpustakaan Negara pertama kali berdiri tahun 1949 di Yogyakarta diikuti Semarang, Bandung dan Makasar.

5.3. Perpustakaan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Perpustakaan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Mei 1980⁸. Dalam kaitannya dengan definisi yang diberikan CDNL, maka pasal 4 menyatakan fungsi Perpustakaan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengembangan, serta mendayagunakan bahan pustaka yang diterbitkan di Indonesia sebagai koleksi deposit nasional;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengembangan, serta mendayagunakan bahan pustaka dengan mengutamakan bidang ilmu sosial dan kemanusiaan dan terbitan asing tentang Indonesia;
- c. melaksanakan penyusunan dan penerbitan bibliografi nasional;
- d. melaksanakan tugas sebagai pusat kerjasama antar perpustakaan di dalam negeri, maupun dengan luar negeri
- e. memberikan jasa referensi studi, jasa bibliografi dan informasi ilmiah;
- f. melaksanakan urusan tata usaha Perpustakaan Nasional.

⁴ Indonesia. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] *Keputusan Menteri... pembentukan Kantor Bibliografi Nasional.*

⁵ Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] *Keputusan no. 0199/0/1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja perpustakaan wilayah...*

⁶ Wawancara dengan Hj Suprihati, mantan Deputy Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2004 – 2006 di Jakarta tanggal 23 Oktober 2008.

⁷ Indonesia. Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] *Keputusan Menteri... no. 29103/S tertanggal 23 Mei 1956 tentang kedudukan, tugas dan penjenjangan Perpustakaan Negara.*

⁸ Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Keputusan Menteri ... no. 0164/0/1980 tentang perpustakaan nasional.* Jakarta: 1980.

Bila melihat fungsi a s.d. d, maka Perpustakaan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara fungsional sudah memenuhi syarat sebagai sebuah perpustakaan nasional. Namun demikian, bila dilihat dari segi lain, khususnya fungsi a (melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengembanga, serta mendayagunakan bahan pustaka yang diterbitkan di Indonesia sebagai koleksi deposit nasional) belum atau tidak ditunjang semacam undang-undang deposit, maka Perpustakaan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belum memenuhi syarat penuh sebagai sebuah perpustakaan nasional. Juga keputusan yang membatasi subjek ilmu sosial dan kemanusiaan dapat dipertanyakan karena subjek tersebut belum mencakup semua subjek. Diduga ruang lingkup terbatas pada ilmu sosial dan kemanusiaan dipengaruhi oleh keputusan Hasil-Hasil Workshop Sistim Djaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk Indonesia⁹. Mungkin lebih tepat bila Perpustakaan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bentukun 1980 disebut Perpustakaan Nasional Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, mirip dengan perpustakaan nasional sejenis seperti National Library of Medicine dan National Agricultural atau National Education Library.

Dilihat dari segi eselon, Perpustakaan Nasional Dep. P & K merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan yang hanya menduduki eselon 2 sementara di berbagai negara, kepala atau sebutan lain misalnya Director General (Australia) perpustakaan nasional menduduki jabatan setara eselon 1 tanpa memperhatikan sebutan jabatan¹⁰.

Di segi lain, keputusan tersebut mengintegrasikan lembaga yang memiliki fungsi baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan fungsi sebuah perpustakaan nasional. Adapun lembaga yang diintegrasikan ialah Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Bidang Bibliografi dan Deposit Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan pada Museum Nasional, dan Perpustakaan Wilayah Departemen : Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5.3.1. Hasil integrasi

Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perpustakaan Nasional Dep. P & K berdiri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan¹¹. Perpustakaan Nasional Dep P &K merupakan hasil integrasi empat perpustakaan yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah dan Politik, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta dan Bidang Deposit.

5.3.1.1. Perpustakaan Museum Pusat

Perpustakaan Museum Pusat berasal dari Perpustakaan Museum. Adapun museum tersebut semula merupakan bagian dari Lembaga Kebudayaan Nasional. Sebelum tertebtnuk Lembaga Kebudayaan Indonesia, lembaga itu dikenal dengan nama Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

⁹ Sistim Djaringan Dokumentasi dan Infotrmasi Ilmiah untuk Indonesia, *Laporan hasil-hasil workshop...*1971. Workshop tersebut memutuskan pembentukan djaringan dokumentasi dan informasi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dengan koordinator Perpustakaan Museum. Gagasan ini berdampak besar karena sampai tahun 2000 an, pejabat Perpustakaan Nasional RI masih berpendapat bahwa koleksi mereka khusus bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, pada hal koordinator lain yang ditunjuk (Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, Perpustakaan Kesehatan dan Bibliotheca Bogoriensis) tidak berfungsi sebagai perpustakaan nasional sebuah subjek.

¹⁰ Kepala National Library of Australia disebut Director General, kepala Library of Congress disebut Librarian of Congress

¹¹ Keputusan no. 0164/0/1980 tanggal 17 Mei 1980 ditandatangani oleh Dr Daoed Joesoef.

Wetenschappen. Istilah Koninklijk baru digunakan pada tahun 1924¹², sebelumnya bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang didirikan pada tahun 1778 di Batavia.

5.3.1. 2. Perpustakaan Sejarah dan Politik

Perpustakaan Sejarah dan Politik didirikan tahun 1952 atas bantuan Bung Hatta semasa menjabat Wakil Presiden¹³ Gedung tersebut menempati bekas gedung Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking), selanjutnya diambil alih oleh Kopra Fonds¹⁴.

Bila diringkas, Perpustakaan Nasional RI yang berdiri pada tahun 1989 merupakan integrasi Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Perpustakaan Wilayah. Pusat Pembinaan Perpustakaan didirikan tahun 1975, sebelumnya bernama Lembaga Perpustakaan yang berdiri tahun 1967. Lembaga Perpustakaan merupakan kelanjutan dari Biro Perpustakaan yang berdiri mulai tahun 1951 walaupun baru katif tahun 1954.

Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan didirikan tahun 1980 merupakan gabungan Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI dan Bidang Bibliografi dari Pusat Pembinaan Perpustakaan. Bila dirunut sejarah keempat lembaga, maka dari segi kelembagaan yang tertua adalah Perpustakaan Museum Nasional sebagai kelanjutan dari Perpustakaan Museum, selanjutnya merupakan lanjutan dari Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), LKI itu sendiri merupakan lanjutan Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang mulai menggunakan nama itu sejak tahun 1924 sebagai penghargaan atas karyanya. Sebelum menggunakan tambahan nama Koninklijk, nama yang digunakan adalah Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen didirikan di Batavia tahun 1778.

Dengan melihat sejarah kelembagaan, maka sejarah Perpustakaan Nasional RI yang sekarang ini dapat dirunut sampai tahun 1778 berdasarkan sejarah kelembagaan yang membentuk Perpustakaan Nasional RI. Akan timbul pertanyaan apakah orang Indonesia mau mengakui sejarah perpustakaan nasional mereka mundur lebih dari 250 tahun ke belakang, didirikan oleh tokoh Vereenigde Oost Indie Compagnie, kelak hutang piutangnya diambil oleh pemerintah belanda. Dari pemerintah Belanda berkembang menjadi pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia sampai tahun 1942 sebelum dikalahkan Jepang. Dapat diterima atau tidak terpulang pada penafsiran masing-masing.

¹² Bernet Kempers "Het Bataviaasch Genootschap van 1778". *Siepegel Historiae*, 14, Maart 1979: 165-173; juga "A short history of a time-honoured library: the library of the Bataviaasch Genootschap." Dalam *Improving access to Indonesian collections in Netherlands: contributions to a survey of Dutch library and documentation activities in the field of Indonesian studies*. Leiden: 1981 Mastini Hardjo Prakoso, "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia." Makalah, Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia; "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia." *Madjalah HPCI*, 4 (1) 1973: 2-14

¹³ Sayangbati-Dengah "Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan," *Berita MIPI*, 4 (1) 1983: -----. *Perpustakaan Nasional: pertumbuhan, perkembangan dan langkah majunya*. Jakarta: 1992. Tak diterbitkan

¹⁴ *Ibid*,

BAB 6

PENDEKATAN BERDASARKAN KOLEKSI

6.1. Pendahuluan

Bila melihat sejarah perpustakaan nasional di berbagai negara, maka pembaca akan menemukan kenyataan bahwa koleksi awal sebuah perpustakaan nasional dimulai dari koleksi pribadi. Misalnya, Library of Congress dimulai dengan koleksi pribadi Thomas Jefferson, The British Library diawali dengan koleksi The Bodleyan Library yang dipelopori oleh Sir Bodley. Dengan menggunakan pendekatan koleksi, maka uraian menyangkut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia harus menggunakan pendekatan urut mundur atau retrospektif. Artinya pembahasan dimulai dari masa kini mundur ke belakang.

Berdasarkan Keputusan Presiden no.11 tahun 1989, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilebur dengan Pusat Pembinaan Perpustakaan departemen Pendidikan dan kebudayaan menjadi sebuah lembaga baru. Adapun lembaga baru tersebut bernama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dsingkat PNRI¹. Bab ini menggunakan pendekatan koleksi kedua lembaga.

6.2. Perpustakaan Nasional Dep. P & K.

Perpustakaan Nasional Dep. P & K berdiri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan². Perpustakaan Nasional Dep P & K merupakan hasil integrasi empat perpustakaan yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah dan Politik, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta dan Bidang Deposit.

6.2.1. Koleksi Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpustakaan Nasional Dep. P & K berdiri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan³. Perpustakaan Nasional Dep P & K merupakan hasil integrasi empat perpustakaan yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah dan Politik, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta dan Bidang Deposit.

6.2.1.1. Perpustakaan Museum Pusat

Pada saat integrasi tahun 1980, koleksi Perpustakaan Museum Pusat berjumlah 400.000 eksemplar⁴. Perpustakaan Museum Pusat ini sebelumnya merupakan Perpustakaan Museum yang menerima hibah koleksi dari Lembaga Kebudayaan Nasional⁵. Adapun Lembaga Kebudayaan Nasional merupakan kelanjutan dari Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Istilah Koninklijk baru digunakan pada tahun 1924⁶. Sebelumnya lembaga tersebut bernama Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang didirikan pada tahun 1778 di Batavia.

Fungsi lain berupa penyusunan bibliografi sebagai hasil undang-undang deposit. Pada tahun 1846 dengan judul *Bibliotecae Societatis Artium Scientiarumquae quae Batavia flore, catalogus systematics* hasil

¹ Penggunaan singkatan PNRI, bukan Perpustakaan Nasional, dalam tulisan ini adalah untuk menghindari kerancuan antara Perpustakaan Nasional yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1980-1989) dengan Perpustakaan Nasional yang terbentuk pada tahun 1989.

² Keputusan no. 0164/0/1980 tanggal 17 Mei 1980 ditandatangani oleh Dr Daoed Joesoef.

³ Keputusan no. 0164/0/1980 tanggal 17 Mei 1980 ditandatangani oleh Dr Daoed Joesoef.

⁴ Periksa misalnya Wawancara dengan Zainuddin Kamal di Jakarta tgl 2009. Jumlah tersebut.

⁵ Amir Sutaarga,...

⁶ Bernet Kempers..., Mastini (1973)

suntingan P. Bleeker. Terbitan kedua dalam bahasa Belanda muncul tahun 1853. Karya Mr J.A. van der Chijs tahun 1864 berjudul *Catalogus der Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen*.

Di antara koleksi yang berjumlah 400.000 ribu tersebut terdapat sekitar 10.000 buku yang semula berada dalam keadaan rusak namun kemudian berhasil diperbaiki.

6.2.1.2. Perpustakaan Sejarah dan Politik

Perpustakaan Sejarah dan Politik didirikan tahun 1952 atas bantuan Bung Hatta semasa menjabat Wakil Presiden⁷ Gedung tersebut menempati bekas gedung Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking), selanjutnya diambil alih oleh Kopra Fonds⁸.

6.2.1.3. Bidang Bibliografi dan Deposit Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Di sini nampak tumpang tindih dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Bibliografi Pusat Pembinaan Perpustakaan.

6.2.1.4. Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Perpustakaan Wilayah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perpustakaan Wilayah DKI merupakan perpustakaan wilayah tipe A karena memiliki koleksi 20.000 bahan pustaka atau lebih⁹. Akibat perubahan ini maka perpustakaan wilayah yang lain berada di bawah Pusat pembinaan Perpustakaan. Sayangnya menyedihkan integrasi Perpustakaan Wilayah DKI ke Perpustakaan Nasional Dep P &K, karena dengan demikian tidak ada lagi yang melayani langsung keperluan pemakai di Jakarta. Sebaliknya ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa karena terjadi tumpang tindih layanan kepada pemakai di Jakarta (Perpustakaan sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Museum Nasional dan Perpustakaan Wilayah dep. P &) maka perlu digabungkan agar dapat memberikan layanan maksimal¹⁰.

Perpustakaan Wilayah itu sendiri merupakan metamorfosa Perpustakaan Negara¹¹. Dalam keputusan Menteri PP&K 1956, Perpustakaan Negara tidak ditugaskan mengumpulkan semua terbitan. Nampaknya tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Bibliografi Nasional.

Perpustakaan Negara pertama kali berdiri tahun 1949 di Yogyakarta diikuti Semarang, Bandung dan Makasar.

6.3. Pusat Pembinaan Perpustakaan

Di sini hanya dibahas hal ikhwal Pusat Pembinaan Perpustakaan yang berkaitan dengan koleksi.

⁷ Sayangnya-Dengah,....

⁸ Ibid,

⁹ Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] Keputusan no. 0199/0/1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja perpustakaan wilayah...

¹⁰ Wawancara dengan Hj Suprihati, mantan Deputy Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2004 – 2006 di Jakarta tanggal 23 Oktober 2008.

¹¹ Indonesia. Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] Keputusan Menteri... no. 29103/S tertanggal 23 Mei 1956 tentang kedudukan, tugas dan penyelenggaraan Perpustakaan Negara.

6.3.1. Bagian Bibliografi Nasional

Bagian ini bertugas menyelenggarakan bibliografi nasional, bibliografi khusus serta menyelenggarakan kataklogus induk, dan bertindak sebagai perpustakaan deprest. Karena bagian ini mewarisi koleksi Kantor Bibliografi Nasional, maka cakupan koleksinya dimulai tahun 1953 (Tabel 6.1.)

Tabel 6.1.
Cakupan Kantor Bibliografi Nasional

Tahun	Judul buku	Tahun	Judul buku
1953	576	1960	530
1954	631	1961	857
1955	191	1962	399
1956	472	1963	428
1957	390	1964	731
1958	1,075	1965	726
1959	580	1966	443
		1967	356

Sumber : Pusat Pembinaan Perpustakaan (1979)
dan Perpustakaan Nasional RI (1990)

Data di atas dapat dilanjutkan data pada Tabel 6.2.

Memiliki koleksi sekitar 30.000 buku, semula merupakan bagian dari bagian serupa pada Lembaga Perpustakaan. Ada pun Lembaga Perpustakaan itu merupakan lanjutan dari Biro Perpustakaan. Koleksi sebanyak 30.000 buku merupakan warisan dari Kantor Bibliografi Nasional.

Tabel 3.2.
**Hasil Bagian Bibliografi Nasional,
Lembaga Perpustakaan**

Tahun	Judul buku
1967	356
1968	252
1969	303
1970	Tak ada data
1971	682
1972	584
1973	Digabung dengan data 1975
1974	Digabung dengan data 1975
1975	2.439

Sumber : Pusat Pembinaan Perpustakaan
(1979) dan Perpustakaan Nasional RI (1990)

TABEL 6.3.
BIBLIOGRAFI NASIONAL INDONESIA
Terbitan Pusat Pembinaan Perpustakaan

Tahun	Jumlah judul
1975	2,439
1976	1,496
1977	1,037
1978	1,272
1979	1,710
1980	1,104
1981	3,600
1982	2,999
1983	3,179

1984	2,360
1985	2,912
1986	3,016
1987	2,283
1988	3,047
1989	3,210

Tidak banyak yang dilaporkan mengenai bibliografi nasional¹² dalam pelaksanaan tugasnya selama hampir 20 tahun, yang terbagi atas dua periode, yaitu periode 1975-1980 dan 1980-1989, selain bahwa lembaga tersebut bertindak sebagai perpustakaan deposit¹³. Salah satu terbitan yang perlu dicatat ialah *Bibliografi Nasional Indonesia: kumulasi 1943-1963* yang disusun oleh Joesoef Tjoen dkk¹⁴. Terbitan tersebut muncul dalam 2 jilid merupakan terbitan unik karena masalah teknis baru muncul tahun 1965. Bersamaan dengan itu muncul larangan pengarang yang teergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakjat) yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga banyak halaman yang kosong karena memuat entri pengarang Lekra.

Laporan tentang bibliografi daerah menyebutkan penyusunan bibliografi daerah¹⁵ yang menyebutkan jumlah eksemplar bibliografi daerah tetapi bukan entri yang dimuatnya. Dengan demikian dari *Memorandum* tidak dapat diketahui berapa judul yang dicakup dalam bibliografi nasional semasa di bawah Pusat Pembinaan Perpustakaan Peran koleksi lain tidaklah dominan.

6.3.2. Perpustakaan Wilayah

Pusat Pembinaan Perpustakaan menaungi semua perpustakaan wilayah terkecuali perpustakaan wilayah DKI. Bagian tersebut berada di bawah operasional Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpustakaan Wilayah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perpustakaan Wilayah DKI merupakan perpustakaan wilayah tipe A karena memiliki koleksi 20.000 bahan pustaka atau lebih¹⁶. Akibat perubahan ini maka perpustakaan wilayah yang lain berada di bawah Pusat pembinaan Perpustakaan. Sayangbati menyedihkan integrasi perpustakaan wilayah ke Perpustakaan Nasional Dep P &K karena tidak lagi melayani langsung keperluan pemakai di Jakarta. Sebaliknya pendapat yang menyatakan bahwa tumpang tindih layanan kepada pemakai di Jakarta (Perpustakaan sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Museum Nasional dan Perpustakaan Wilayah Dep. P &) perlu digabungkan agar dapat memberikan layanan maksimal¹⁷.

Perpustakaan Wilayah itu sendiri merupakan metamorfosa Perpustakaan Negara¹⁸. Dalam keputusan Menteri PP&K 1956, Perpustakaan Negara tidak ditugaskan mengumpulkan semua terbitan. Nampaknya tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Bibliografi Nasional.

¹² Ibid, p. 50

¹³ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *Memorandum...*,p.9

¹⁴ Biografi Moehammad Joesoef Tjoen dimuat pada halaman 136 *Memorandum* Penerbit adalah Proyek Perpustakaan Nasional dan Bina Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1964

¹⁵ Pusat Pembinaan Perpustakaan, *mwemorandum*, p.258-9

¹⁶ Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. [Undang-Undang, Peraturan,dsb] *Keputusan no. 0199/0/1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja perpustakaan wilayah...*

¹⁷ Wawancara dengan Hj Suprihati, mantan Deputy Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indoensia pada tahun 2004 – 2006 di Jakarta tanggal 23 Oktober 2008.

¹⁸ Indonesia. Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] *Keputusan Menteri... no. 29103/S tertanggal 23 Mei 1956 tentang kedudukan, tugas dan penjelenggaraan Perpustakaan Negara.*

Perpustakaan Negara pertama kali berdiri tahun 1949 di Yogyakarta diikuti Semarang, Bandung dan Makasar.

Bila merujuk ke pendekatan koleksi, maka sejarah perpustakaan nasional RI dapat dirunut sampai abad 18 tatkala Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Dengan sejarahnya yang panjang sampai tahun 1962, maka koleksi Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dengan wujud nama yang berlainan (Lembaga Kebudayaan Indonesia, Perpustakaan Museum, Perpustakaan Museum Pusat) maka koleksi tersebut merupakan koleksi dominan. Koleksi tersebut merupakan koleksi terlengkap tentang Indonesia sebelum tahun 1942¹⁹.

Sama seperti bab terdahulu, akan timbul pertanyaan apakah pembaca bersedia mengakuibahwa dari segi koleksi, Perpustakaan Nasional RI sudah ada sejak tahun 1778. Bagi negara yang tidak mengalami penjajahan, perunutan sejarah dapat dilakukan ke belakang tanpa menimbulkan kegelisahan ideologi. Sebagai contoh Library of Congress dapat merunut sejarahnya sampai ke presiden Thomas Jefferson yang menyerahkan koleksi pribadinya sebagai dasar koleksi Library of Congress.

¹⁹ Mastini..., Luwarsih..., Bernet kempers,....

BAB 7 PENUTUP

Bila melihat uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat ditelusur melalui berbagai pendekatan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh pertemuan Conference of Directors of National Libraries (CDNL) di Bangkok tahun 1999. Konferensi tersebut memberikan definisi sebuah perpustakaan nasional sebagai berikut:

Sebuah institusi, terutama didanai (langsung atau tidak langsung) oleh negara, yang bertanggung jawab atas pengumpulan secara komprehensif, pencatatan bibliografis, pelestarian dan menyediakan warisan dokumenter (terutama materi yang diterbitkan dalam semua jenis) yang berasal atau berkaitan dengan negara tersebut; dan dapat juga bertanggung jawab atas pelaksanaan lebih lanjut fungsi perpustakaan di negara tersebut secara efisien dan efektif melalui tugas seperti manajemen koleksi yang maknawi secara nasional, penyediaan infrastruktur, koordinasi aktivitas perpustakaan dan sistem informasi di negara bersangkutan, hubungan internasional, dan melaksanakan kepemimpinan. Biasanya tanggung jawab ini secara formal diakui lazimnya berdasarkan undang-undangan. Untuk keperluan definisi ini maka sebuah negara didefinisikan sebagai negara independen berdaulat.

Institusi yang disetarakan dengan perpustakaan nasional terdapat juga di entitas nasional non-berdaulat seperti di Catalonia, Quebec dan Wales.¹ Dengan menggunakan ancangan ini, maka perpustakaan nasional Indonesia dapat ditelusur sampai tahun 1856 tatkala pemerintah Hindia Belanda mewajibkan penerbit di Hindia Belanda menyerahkan contoh terbitannya ke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap.

Bila menggunakan ancangan konsep maka perpustakaan nasional di Indonesia sudah digagas pada tahun 1953 berdasarkan laporan Dunningham. Dunningham menghasilkan sebuah laporan berjudul *Report in a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia*² yang dianggap klasik dalam literatur kepustakawanan Indonesia karena untuk pertama kalinya diusulkan pembentukan sistem nasional perpustakaan.

Dalam laporannya Dunningham mengatakan perlunya pembentukan sistem nasional perpustakaan (*National Library System*)³. Ada yang mengatakan bahwa gagasan tersebut tidak sama dengan gagasan sebuah perpustakaan nasional. Namun melihat konsepnya maka apa yang dilaporkan itu sebenarnya gagasan perpustakaan nasional. Gagasan itu juga tidak terlepas dari lingkungannya, New Zealand, tempat di mana dikenal national library service. Pendapat tersebut juga didukung penelitian bibliometrik atas semua karya tentang perpustakaan nasional, semuanya merujuk ke laporan Dunningham. Praktis semua tulisan tentang perpustakaan nasional di Indonesia selalu merujuk ke laporan tersebut.

Bila menggunakan pendekatan kelembagaan maka Perpustakaan Nasional RI baru berdiri pada tahun 1989. Perpustakaan tersebut memenuhi syarat batasan sebuah perpustakaan nasional yaitu mengumpulkan semua terbitan dari Indonesia serta ditunjang oleh undang-undang deponasi yang keluar pada tahun 1990. Dari segi kelembagaan, Perpustakaan Nasional RI merupakan integrasi antara Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

¹ "National libraries" *International Encyclopedia of Information and Library Science*. Edited by John Feather and Paul Sturges. 2nd ed. (London: Routledge, 2003), p. 445

² Paris: UNESCO, 1953

³ A.G.W. Dunningham dan R. Patah, *Report on a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia*. Paris: UNESCO, 1953.

Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta dan Pusat Pembinaan Perpustakaan yang membawahi semua perpustakaan wilayah terkecuali Jakarta.

Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komponen Perpustakaan Museum Pusat, Perpustakaan sejarah Politik dan Sosial, Bagian Bibliografi dan Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta. Perpustakaan Museum Pusat berasal dari Perpustakaan Museum sedangkan perpustakaan museum semula merupakan bagian dari Lembaga Kebudayaan Indonesia yang berdiri tahun 1952. Lembaga Kebudayaan Indonesia ini dahulu bernama Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Nama tersebut mulai digunakan sejak tahun 1924. Adapun nama semula adalah Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen didirikan tahun 1778.

Jadi, dilihat dari anjakan koleksi maupun kelembagaan, Perpustakaan Nasional RI dapat dirunut ke belakang sampai tahun 1778, bersamaan dengan berdirinya Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Maka hari jadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam arti sebagai sebuah perpustakaan yang ditunjang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya wajib serah simpan, jatuh pada tanggal 6 Maret sesuai dengan keluarnya Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989. Bila selama ini hari jadi selalu dirayakan setiap tanggal 17 Mei sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 200/0/1980. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memang dikeluarkan tgl 21 Juli 1980 namun berlaku surut sejak 17 Mei 1980. Itulah hari jadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dirayakan sampai sekarang.

BIBLIOGRAFI

- Bernet Kempers, A.J. "Het Bataviaasch Genootschap van 1778". *Siepegel Historiae*, 14, Maart 1979: 165-173
- . "A short history of a time-honoured librarit: the library of the Bataviaasch Genootschap." Dalam *Improving access to Indonesian coolextions in Netherlands: contributions to a survey of Dutch library and documentation activities in the field of Indonesian studies*. Leiden: 1981
- Dewan Perantjang Nasional. *Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Nasional Semesta Berentjana delapan tahun: 1961-1969*. Jakarta: 1961.
Jilid V
- Dunningham, A.G.W. and Patah, R. *Report in a survey and recommendation dor the establishment of a national library service in Indonesia*. Paris: UNESCO, 1953
- "Genootschappen." *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. 1972.
- Groot, J P M. *Van de Grote Rivier baar het Koningsplein: het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1778 – 1867*.
Proefschrift – Leiden Universiteit – 2006
- Hardjoprakoso, Mastini. *Bunga rampai kepustakawanan*.
Dikumpulkan oleh Wartini Santoso. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2005.
- . "Masalah perpustakaan nasional di Indonesia," *Berita MIPI*, 1 (14) 1985: 15
- . "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia." Makalah, Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia
- . "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia." *Madjalah HPCI*, 4 (1) 1973: 2-14
- IFLA/UNESCO. *The school library manifesto: the school library in teaching and learning for all*. The Hague: IFLA, 2000.
www.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm
www.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm
- Indonesia. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] *Keputusan Presiden ... nomor 11 tahun 1989 tentang perpustakaan nasional*.
- Indonesia. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] *Undang-Undang ... nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya-cetak dan karya rekam*.
- International Federation of Library Associations and Institutions. (1986). *Guidelines for public libraries: prepared for the IFLA Section of Public Libraries*. The Hague: IFLA
- International Encyclopedia of Information and Library Science*. Ed. By John Feather and Paul Sturges. London: Routledge, 2003.
- International Federation of Library Associations and Institutions. (1986). *Guidelines for public libraries: prepared for the IFLA Section of Public Libraries*. The Hague: IFLA, 1986.
- Jaarboek van het Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, Deel 10, 1948-1951, Bandung: Masa Baru, 1954.
- Kolff, G. *Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150 jarig*

- bestaan, 1778 – 1928*. Weltevreden: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1929.
2 jil.
- Mochtar, Kustiniyati. *Sosok pribadi unik Mastini Hardjoprakoso*. Jakarta: Yayasan Kawesri, 1994.
- Natadjudjuma, Rachmad. "An Indonesian national library," *Australian Academic Research Libraries*, 9, 1977: 127-30
- Notulen van de Algemeene en Bestuuren vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Batavia: Lange
- "Openbare leeszaal, bibliotheken en volksbibliotheken in Nederlandsch –Indie," *Nieuwsblad voor Boekhandel in Nederlandsch Oost Indie*, 2 (5) Mei 1941: 33-37
- "Openbare leeszaal, bibliotheken en volksbibliotheken in Nederlandsch –Indie," *Nieuwsblad voor Boekhandel in 2 (6) Junie 1941: 41-3* *Nederlandsch Oost Indie*
- Panitia Perencana Pelaksanaan Rekomendasi tentang Sistem Nasional Peprustakaan dan Perpustakaan Nasional di Indonesia. *Hasil perumusan saran-saram tentang sistem nasional perpustakaan dan perpustakaan nasional di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pengembangan Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978
- Perpustakaan Nasional: pertumbuhan, perkembangan dan langkah majunya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1991
- Perpustakaan Negara Yogyakarta. *Buku pedoman*. Yogyakarta: 1977.
- Poon, Paul M.T. "A proposed national library system in Indonesia," *Australian Academic Research Libraries*, 6 (11) 1975: 20-30
- Pringgoadisurjo, Luwarsih. "Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia: suatu tanggapan". *Madjalah HPCI*, 4 (2) 1973: 53-8
- Pusat Pembinaan Perpustakaan. *Memorandum Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: 1991
- "Putusan Konperensi Perpustakaan Seluruh Indonesia." *Perpustakaan*, 1 (1) 1954: 1
- Sayangbati-Dengah, W.W. "Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan," *Berita MIPI*, 4 (1) 1983:
----- . *Perpustakaan Nasional: pertumbuhan, perkembangan dan langkah majunya*. Jakarta: 1992. Tak diterbitkan
----- . *Kilas balik sejarah koleksi surat kabar langka Perpustakaan Nasional RI*. Makalah pada Seminar dan Pameran Surat Kabar Langka Mkoleksi Perpustakaan Nasional, 23 September 2003
- Soemardjan, Selo. *Laporan dan rekomendasi tentang sistem nasional perpustakaan dan perpustakaan nasional*. Jakarta: 1977
- Sutaarga, Moh. Amir. Workshop Sistim Djaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk Indonesia, Bandung, 1971. *Laporan hasil-hasil workshop...*
T.t:t.tp., 1971.
- UNESCO (1995). "Public library manifesto 1994" IFLA Public Library News, Newsletter of the Section of Public Libraries, (12) January
- Zen, Zulfikar. "Perpustakaan nasional Indonesia: perjalanan yang panjang." *Majalah Ilmu Perpustakaan & Informatika*, 9 (1) 1984: 17-28